

# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI ACEH

Mei 2026





**LAPORAN  
PEREKONOMIAN**  
Provinsi Aceh

MEI  
2026

## Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging market* untuk Indonesia Maju.

## Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

## Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh  
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia  
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku “Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2026” ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pulih lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya, seiring berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pada triwulan I 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,61% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Aceh tercermin dari meningkatnya kinerja Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.
2. Inflasi Aceh pada triwulan I 2026 masih tinggi namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 5,34% (yoy), melandai jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang menyentuh level 6,71% (yoy). Membaiknya tekanan inflasi sejalan dengan mulai pulihnya jalur distribusi pascabencana di tengah dorongan permintaan yang meningkat pada bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.
3. Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari masih positifnya pertumbuhan pembiayaan dengan kualitas yang baik seiring masih rendahnya *Non-Performing Financing* (NPF). Selain itu, inklusivitas pembiayaan menunjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 25,33%. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mengalami ekspansi sebesar 11,48% (yoy).
4. Pada triwulan I 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Sementara, metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan APMK dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.
5. Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diprakirakan tumbuh terakselerasi pada kisaran 4,66%-5,16% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%.

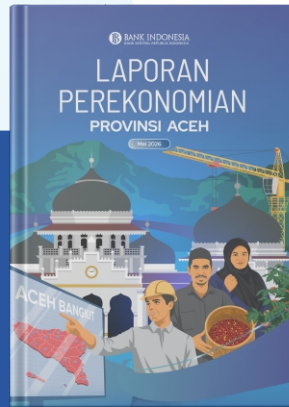
Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Mei 2026  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

**Agus Chusaini**  
Kepala Perwakilan



## Survei Tingkat Kepuasan *Stakeholders* Terhadap Kualitas Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh Periode Mei 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh, Bank Indonesia melakukan survei tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap LPP. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenaan Saudara untuk dapat meluangkan waktunya dan mengisi survei melalui QR Code/link berikut ini :



[https://bit.ly/Survei\\_LPP\\_Aceh\\_Mei2026](https://bit.ly/Survei_LPP_Aceh_Mei2026)

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi  
sdr. Muhammad Raziq Ilmi / 0812 5397 3784  
Email : [mraziq\\_ilmi@bi.go.id](mailto:mraziq_ilmi@bi.go.id)

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator	xii

## 01

### Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1. Gambaran umum	2
1.2. Sisi Permintaan	2
1.3. Sisi Lapangan Usaha	7
Boks1 Perkembangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Aceh	13

## 02

### Perkembangan Inflasi Daerah

2.1. Perkembangan Umum Inflasi	16
2.2. Analisis Perkembangan Inflasi	16
2.3. Tracking Inflasi Triwulan II 2026 dan Inflasi 2026	20
2.4. Inflasi Spasial	21
2.4.1. Gambaran Umum	21
2.4.2. Inflasi Kota Banda Aceh	21
2.4.3. Inflasi Kota Lhokseumawe	21
2.4.4. Inflasi Kota Meulaboh	22
2.4.5. Inflasi Kabupaten Aceh Tengah	22
2.4.6. Inflasi Kabupaten Aceh Tamiang	22
2.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh	23

## 03

### Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

3.1. Kondisi Umum	26
3.2. Intermediasi Perbankan	27
3.2.1. DPK Menurut Jenisnya	27
3.2.2. DPK Menurut Kepemilikan	27
3.2.3. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan	28
3.2.4. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)	29
3.2.5. Pembiayaan UMKM	29
3.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh	29

## 04

### Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1. Sistem Pembayaran Tunai	34
4.2. Sistem Pembayaran Non Tunai	34
4.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	37
4.4. Penyaluran PKH dan Program Sembako	37

## 05

### Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1. Ketenagakerjaan	42
5.2. Kemiskinan	43

## 06

### Prospek Perekonomian

6.1. Prospek Makroekonomi	48
6.2. Prospek Inflasi	49
6.3. Rekomendasi Kebijakan	50

# Daftar Grafik

## 01

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw I 2026 (% ,yoy)	2
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi	2
Grafik 1.3.	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan	3
Grafik 1.4.	Pertumbuhan Konsumsi RT	3
Grafik 1.5.	Perkembangan Survei Konsumen	3
Grafik 1.6.	Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	3
Grafik 1.7.	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	5
Grafik 1.8.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan	5
Grafik 1.9.	Pertumbuhan PMTB	6
Grafik 1.10.	Perkembangan Pembiayaan Investasi	6
Grafik 1.11.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6
Grafik 1.12.	Perkembangan Ekspor Batubara	6
Grafik 1.13.	Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh	7
Grafik 1.14.	Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa	7
Grafik 1.15.	Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri	7
Grafik 1.16.	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan I 2026	8
Grafik 1.17.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	8
Grafik 1.18.	Perkembangan Produksi Padi	8
Grafik 1.19.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	8
Grafik 1.20.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	9
Grafik 1.21.	Pertumbuhan Penjualan Kendaraan	9
Grafik 1.22.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	9
Grafik 1.23.	Perkembangan Pengadaan Semen	9
Grafik 1.24.	Pertumbuhan PMTB	9
Grafik 1.25.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	10
Grafik 1.26.	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	10
Grafik 1.27.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	10
Grafik 1.28.	Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue	10
Grafik 1.29.	Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar	11
Grafik 1.30.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11
Grafik 1.31.	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri	11
Grafik 1.32.	Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan	11
Grafik 1.33.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin	11
Grafik 1.34.	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	12

## 02

Grafik 2.1.	Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan I 2026 (% , yoy)	16
Grafik 2.2.	Perkembangan Harga Emas Dunia	20
Grafik 2.3.	Perkembangan Survei Konsumen	20
Grafik 2.4.	Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy)	21

## 03

Grafik 3.1.	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)	26
Grafik 3.2.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga	26
Grafik 3.3.	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh Berdasarkan Lokasi Proyek	26
Grafik 3.4.	Perkembangan Non-Performing Financing (Berdasarkan Lokasi Bank)	26
Grafik 3.5.	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)	27
Grafik 3.6.	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)	27
Grafik 3.7.	Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)	27
Grafik 3.8.	Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis	27
Grafik 3.9.	Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)	27
Grafik 3.10.	Perkembangan DPK Perseorangan	28
Grafik 3.11.	Perkembangan DPK Pemerintah	28
Grafik 3.12.	Perkembangan DPK Korporasi	28
Grafik 3.13.	Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)	28
Grafik 3.14.	Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan	29
Grafik 3.15.	Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha	29
Grafik 3.16.	Perkembangan Pembiayaan UMKM	29

## 04

Grafik 4.1.	Netflow Kas (Rp Triliun)	34
Grafik 4.2.	Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% , yoy)	34
Grafik 4.3.	Temuan Uang Palsu (Lembar)	34
Grafik 4.4.	Perkembangan Nominal SKNBI	34
Grafik 4.5.	Perkembangan Volume SKNBI	35
Grafik 4.6.	Perkembangan Nominal BI-RTGS	35
Grafik 4.7.	Perkembangan Volume BI-RTGS	35
Grafik 4.8.	Transaksi ATM Debit	35
Grafik 4.9.	Transaksi Kartu Kredit	36
Grafik 4.10.	Perkembangan Transaksi UE	36
Grafik 4.11.	Perkembangan Merchant QRIS	36
Grafik 4.12.	Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	36
Grafik 4.13.	Transaksi KUPVA BB	37
Grafik 4.14.	Disagregasi Transaksi UKA	37

Grafik 4.15.	Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)	37
Grafik 4.16.	Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)	38
Grafik 4.17.	Perkembangan Program Sembako (Nominal)	38
Grafik 4.18.	Perkembangan Program Sembako (KPM)	38

## 05

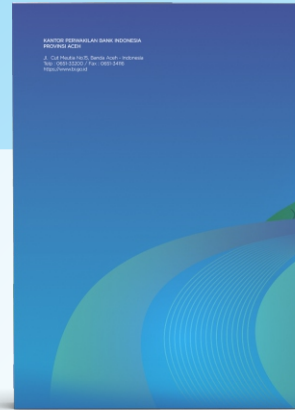
Grafik 5.1.	Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)	42
Grafik 5.2.	Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	43
Grafik 5.3.	Penduduk Miskin di Sumatera (%)	44
Grafik 5.4.	Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah	44

# Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2026	4
Tabel 1.2.	Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2026	5
Tabel 2.1.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026	16
Tabel 2.2.	Inflasi Kelompok Barang dan Jasa	16
Tabel 2.3.	Inflasi Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau	17
Tabel 2.4.	Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki	17
Tabel 2.5.	Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	18
Tabel 2.6.	Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT	18
Tabel 2.7.	Inflasi Kel. Kesehatan	18
Tabel 2.8.	Inflasi Kel. Transportasi	18
Tabel 2.9.	Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	19
Tabel 2.10.	Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	19
Tabel 2.11.	Inflasi Kel. Pendidikan	19
Tabel 2.12.	Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	19
Tabel 2.13.	Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	20
Tabel 2.14.	Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% yoy)	21
Tabel 2.15.	Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% yoy)	22
Tabel 2.16.	Andil Inflasi di Meulaboh (% yoy)	22
Tabel 2.17.	Andil Inflasi di Aceh Tengah (% yoy)	22
Tabel 2.18.	Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% yoy)	23
Tabel 5.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	42
Tabel 5.2.	Perkembangan TPT	42
Tabel 5.3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	42
Tabel 5.4.	Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)	43
Tabel 5.5.	Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 5.6.	Nilai Tukar Petani	43
Tabel 5.7.	Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan	44
Tabel 5.8.	Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)	44
Tabel 6.1.	Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2026 (%yoy)	48

# Ringkasan Eksekutif

Mei 2026



## Perkembangan Ekonomi Daerah

➤ **Ekonomi Aceh pulih lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya, seiring berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.**

Ekonomi Aceh pulih lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya, seiring berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pada triwulan I 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,61% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Aceh tercermin dari meningkatnya kinerja Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga

## Perkembangan Inflasi Daerah

**Inflasi Aceh pada pada triwulan I 2026 masih tinggi namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 5,34% (yoy), melandai jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang menyentuh level 6,71% (yoy).**

Inflasi Aceh pada pada triwulan I 2026 masih tinggi namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 5,34% (yoy), melandai jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang menyentuh level 6,71% (yoy). Membaiknya tekanan inflasi sejalan dengan mulai pulihnya jalur distribusi pascabencana di tengah dorongan permintaan yang meningkat pada bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.

## Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

**Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi.**

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari masih positifnya pertumbuhan pembiayaan dengan kualitas yang baik seiring masih rendahnya *Non-Performing Financing* (NPF). Selain itu, inklusivitas pembiayaan menunjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 25,33%. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mengalami ekspansi sebesar 11,48% (yoy).

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan I 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi net outflow pada triwulan laporan. Sementara, metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan APMK dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

## Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan pada Februari 2026 sebagai dampak dari bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Meskipun demikian, kondisi ketenagakerjaan masih menunjukkan beberapa perbaikan dari sisi kualitas, seperti peningkatan proporsi pekerja formal serta penurunan tingkat setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dinamika ini mencerminkan bahwa meskipun tekanan di pasar tenaga kerja meningkat, aktivitas ekonomi tetap berjalan dan mampu menjaga sebagian daya serap tenaga kerja.

## Prospek Perekonomian

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diprakirakan tumbuh terakselerasi pada kisaran 4,66%-5,16% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%. Terakselerasinya pertumbuhan perekonomian Aceh di tahun 2026, seiring dengan mulai efektifnya pembangunan dan rekonstruksi daerah pascabencana, serta normalisasi aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, laju inflasi Provinsi Aceh di tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5\pm 1\%$  (yoy) yang didukung pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Pada triwulan I 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi net outflow pada triwulan laporan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan pada Februari 2026 sebagai dampak dari bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025.

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diprakirakan tumbuh terakselerasi pada kisaran 4,66%-5,16% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%.

# Tabel Indikator

## A. PDRB

### PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Sektoral (Rp Triliun)	2024			2025				2026
	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,83	10,07	11,74	10,58	10,51	10,71	11,83	10,61
Pertambangan dan Penggalian	3,01	2,91	2,95	3,11	3,04	3,02	2,42	2,83
Industri Pengolahan	1,62	1,66	1,71	1,65	1,73	1,75	1,73	1,74
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Konstruksi	3,47	3,78	4,11	3,27	3,46	3,77	3,76	3,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	5,92	6,27	6,18	6,19	6,28	6,26	6,66
Transportasi dan Pergudangan	2,88	2,95	2,94	2,84	3,26	3,10	2,83	2,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,59	0,59	0,58	0,59	0,64	0,58	0,65
Informasi dan Komunikasi	1,65	1,70	1,64	1,64	1,70	1,81	1,60	1,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,59	0,57	0,56	0,57	0,59	0,64	0,66
<i>Real Estate</i>	1,56	1,62	1,59	1,57	1,65	1,74	1,63	1,63
Jasa Perusahaan	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23	0,25	0,24	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	3,33	3,49	3,27	3,47	3,34	3,59	3,51
Jasa Pendidikan	1,04	1,04	1,01	1,00	1,06	1,11	1,04	1,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,38	1,33	1,22	1,32	1,37	1,30	1,29
Jasa lainnya	0,63	0,64	0,60	0,60	0,64	0,64	0,60	0,62
<b>PDRB</b>	<b>37,72</b>	<b>38,50</b>	<b>40,85</b>	<b>38,28</b>	<b>39,54</b>	<b>40,21</b>	<b>40,19</b>	<b>39,95</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

**Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)**

Sektoral Growth (% , yoy)	2024			2025				2026
	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,55%	0,38%	1,11%	0,91%	6,93%	6,36%	0,85%	0,35%
Pertambangan dan Penggalian	17,24%	6,86%	14,68%	19,02%	1,12%	3,79%	-17,79%	-9,05%
Industri Pengolahan	1,50%	2,92%	2,81%	5,49%	6,50%	5,68%	1,07%	6,03%
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	4,86%	4,49%	3,93%	-4,77%	0,53%	5,24%	-11,71%	6,34%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31%	0,89%	0,25%	1,14%	5,82%	0,04%	-8,61%	-1,97%
Konstruksi	8,54%	6,02%	0,05%	-0,11%	-0,28%	-0,07%	-8,42%	15,95%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,91%	3,96%	-0,02%	5,87%	6,13%	6,28%	-0,06%	7,88%
Transportasi dan Pergudangan	15,69%	19,46%	21,12%	9,76%	13,37%	5,09%	-3,60%	0,91%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,97%	6,36%	0,34%	6,26%	5,97%	7,78%	-0,61%	13,54%
Informasi dan Komunikasi	1,13%	5,36%	0,50%	0,03%	2,96%	6,27%	-1,97%	2,21%
Jasa Keuangan dan Asuransi	52,01%	58,69%	0,29%	0,34%	0,96%	0,64%	13,56%	17,96%
<i>Real Estate</i>	4,95%	0,10%	4,32%	1,13%	6,45%	7,28%	2,89%	3,86%
Jasa Perusahaan	6,77%	7,38%	0,54%	0,60%	-2,24	-1,88%	1,52%	2,24%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,17%	6,39%	7,48%	7,81%	-0,22	0,26%	2,91%	7,67%
Jasa Pendidikan	1,65%	6,76%	7,71%	0,73%	2,28	6,67%	4,10%	5,18%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39%	3,70%	9,40%	7,99%	3,46	-0,30%	-1,30%	5,70%
Jasa lainnya	3,10%	4,09%	9,12%	4,69%	3,15	0,64%	-0,07%	4,24%
<b>PDRB</b>	<b>4,54%</b>	<b>5,17%</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,59%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,46%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>4,09%</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

### PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran (Rp Triliun)

Komponen (Rp Triliun)	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Konsumsi Rumah Tangga	20,39	20,83	20,76	20,89	21,41	21,86	21,76	20,31	21,93
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,87	0,75	0,80	0,89	0,86	0,86	0,79	0,93	0,98
Konsumsi Pemerintah	4,15	6,36	6,19	8,10	4,48	5,76	5,83	7,87	5,62
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,58	12,49	12,82	13,09	11,57	12,22	12,78	12,63	12,81
Perubahan Inventori	0,32	-0,12	0,13	-0,11	0,67	0,63	-0,79	-0,07	0,02
Ekspor Barang dan Jasa	18,05	18,21	21,61	23,73	22,34	21,41	22,37	22,28	21,51
Impor Barang dan Jasa	18,66	20,78	23,81	25,75	22,94	22,65	23,25	23,58	23,21
<b>PDRB</b>	<b>36,70</b>	<b>37,72</b>	<b>38,50</b>	<b>40,85</b>	<b>38,38</b>	<b>39,54</b>	<b>40,21</b>	<b>40,19</b>	<b>39,95</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

### Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen (Rp Triliun)	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Konsumsi Rumah Tangga	4,93%	4,24%	3,85%	4,32%	4,99%	4,97%	4,85%	-2,79%	2,47%
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	29,34%	10,67%	18,95%	7,51%	-1,11%	16,32%	-1,44%	5,85%	14,81%
Konsumsi Pemerintah	21,10%	6,89%	5,36%	12,44%	7,99%	-9,40%	-5,62%	-2,86%	25,39%
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,77%	6,36%	5,95%	5,49%	-0,11%	-2,13%	-0,29%	-3,52%	10,76%
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	10,14%	-3,74%	7,68%	11,31%	23,75%	17,62%	3,50%	-6,09%	-3,67%
Impor Barang dan Jasa	11,59%	-0,37%	5,75%	14,91%	22,94%	8,99%	-2,36%	-8,41%	1,19%
<b>PDRB</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,54%</b>	<b>5,17%</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,59%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,46%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>4,09%</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## B. Inflasi

Inflasi (% , yoy)	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Banda Aceh	2,52	2,07	1,84	2,16	1,36	2,63	3,67	6,10	5,20
Lhokseumawe	2,79	2,97	2,11	2,79	1,63	2,07	4,19	5,56	5,46
Meulaboh	4,39	3,94	2,40	3,29	1,46	3,07	4,63	5,56	4,95
Aceh Tamiang	3,38	3,14	0,99	1,77	1,28	1,33	4,80	7,13	4,84
Aceh Tengah	4,51	4,78	0,47	1,63	2,02	1,97	5,80	8,90	6,07
Provinsi Aceh	3,25	3,09	1,50	2,17	1,53	2,19	4,45	6,71	5,31

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## C. Perbankan

### Indikator Umum

Indikator									
Total Aset (Rp Triliun)	56,03	57,67	59,99	63,93	61,30	62,46	63,20	61,89	
Pertumbuhan (yoy)%	9,78	10,85	11,57	10,54	9,41	8,31%	5,35%	1,94%	
DPK (Rp Triliun)	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77	46,05	44,98	
Pertumbuhan (yoy)%	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27%	3,05%	-1,51%	
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	39,06	40,80	42,51	43,98	44,49	45,04	45,98	47,05	
Pertumbuhan (yoy)%	10,28	13,04	13,45	14,04	13,89	10,40%	8,16%	6,97%	
FDR %	94,38	94,14	95,14	96,32	102,67	100,60	99,83	104,61	
NPF-gross %	1,68	1,61	1,64	1,79	1,95	2,06%	2,05%	2,22%	
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,66	0,66	0,70	0,78	0,86	0,92	0,94	1,04	

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

### Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total (Rp Triliun)	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77	46,06	44,98	48,29
Pertumbuhan (yoy)%	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27	3,05	-1,51	11,48
Giro (Rp Triliun)	7,92	8,81	10,51	6,00	6,56	7,41	8,47	6,98	9,76
Pertumbuhan (yoy)%	14,71	30,85	28,41	5,15	-17,11	-15,91	3,05	16,38	48,71
Tabungan (Rp Triliun)	22,99	24,35	24,19	27,11	25,63	25,51	25,67	30,02	29,51
Pertumbuhan (yoy)%	6,71	8,12	9,60	8,50	11,49	4,79	6,16	10,74	15,15
Deposito (Rp Triliun)	10,48	10,19	10,00	12,56	11,12	11,85	11,90	7,97	9,02
Pertumbuhan (yoy)%	-0,47	6,08	3,98	11,76	6,16	16,25	19,10	-36,51	-18,94

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

### Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Kredit (Rp Triliun)	39,07	40,81	42,52	43,98	44,49	45,04	45,98	47,04	48,75
Pertumbuhan (yoy) %	10,28	13,04	13,45	14,02	13,89	10,40	8,16%	6,97	9,59
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,52	7,19	7,43	7,29	7,03	6,88	6,84	6,55	6,44
Pertumbuhan (yoy)%	0,05	8,65	10,07	6,89	8,20	-4,00	-7,84	-10,18	-8,47
Investasi (Rp Triliun)	5,88	6,30	6,77	7,52	7,74	7,74	7,97	8,14	8,27
Pertumbuhan (yoy)%	40,41	38,20	28,91	33,57	31,62	22,85	17,80	8,27	6,86
Konsumsi (Rp Triliun)	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,40	31,16	32,34	34,03
Pertumbuhan (yoy)%	7,87	9,60	11,15	11,63	11,37	11,31	10,04	10,92	14,59

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Kredit (Rp Triliun)	48,66	49,76	51,11	51,87	52,64	51,87	52,90	53,15	55,85
Pertumbuhan (yoy) %	0,57	1,61	2,46	4,66	8,21	4,27	3,53	2,93	6,11
Modal Kerja (Rp Triliun)	11,42	11,77	11,82	12,87	11,52	10,31	10,29	9,32	10,17
Pertumbuhan (yoy)%	-5,42	-6,78	-5,22	1,98	1,02	-12,32	-12,82	-16,79	-11,76
Investasi (Rp Triliun)	8,77	8,91	9,23	9,37	9,85	9,65	9,94	10,08	10,24
Pertumbuhan (yoy)%	-10,16	-7,43	-9,15	-8,53	12,38	8,35	7,82	4,27	4,03
Konsumsi (Rp Triliun)	28,47	29,08	30,06	30,38	31,26	31,90	32,65	33,75	35,43
Pertumbuhan (yoy)%	7,03	8,83	10,29	10,74	9,81	9,73	8,64	9,68	13,35

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

### Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektoral (Rp Triliun)	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian	2,33	3,01	3,28	3,44	3,50	3,48	3,58	3,60	3,64
Perikanan	0,32	0,31	0,31	0,30	0,28	0,28	0,27	0,25	0,25
Pertambangan	0,06	0,06	0,13	0,11	0,13	0,19	0,19	0,27	0,22
Ind, Pengolahan	1,31	1,34	1,34	1,55	1,48	1,33	1,30	1,34	1,32
Listrik, Gas & Air	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,91	0,12	0,11
Konstruksi	0,54	0,57	0,54	0,52	0,46	0,59	0,61	0,51	0,44
Perdagangan	5,52	5,77	6,04	6,25	6,21	6,08	6,08	5,90	6,01
Hotel & Restoran	0,47	0,51	0,53	0,56	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68
Transportasi, Gudang & Kom,	0,27	0,28	0,31	0,33	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30
Perantara Keuangan	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,06	0,06	0,06
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,24	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26	0,25	0,26	0,30
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,31	0,31	0,35	0,37	0,38	0,42	0,45	0,46	0,45
Jasa Kemasyarakatan	0,77	0,81	0,82	0,83	0,82	0,79	0,79	0,77	0,79
Jasa Perseorangan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,41	31,16	32,34	34,03
<b>TOTAL</b>	<b>39,07</b>	<b>40,81</b>	<b>42,52</b>	<b>43,98</b>	<b>44,48</b>	<b>45,04</b>	<b>45,98</b>	<b>47,04</b>	<b>48,75</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektoral (Rp Triliun)	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian	4,15	4,58	4,56	4,77	4,79	4,74	4,86	4,89	4,90
Perikanan	0,32	0,32	0,31	0,31	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25
Pertambangan	1,48	1,16	1,35	1,81	1,78	0,41	0,43	0,49	0,73
Ind, Pengolahan	4,30	4,43	4,22	3,22	3,70	3,93	3,96	2,91	3,51
Listrik, Gas & Air	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,40	0,39	0,86	0,89
Konstruksi	0,89	0,86	0,94	0,88	0,86	0,92	0,96	0,89	0,82
Perdagangan	6,27	6,48	6,72	6,88	6,90	6,52	6,52	6,25	6,40
Hotel & Restoran	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67	0,68	0,69	0,71
Transportasi, Gudang & Kom,	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38	0,40	0,38	0,35	0,33
Perantara Keuangan	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04	0,10	0,11	0,14
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27	0,27
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,32	0,33	0,36	0,38	0,39	0,43	0,45	0,46	0,45
Jasa Kemasyarakatan	0,78	0,82	0,84	0,85	0,84	0,81	0,80	0,78	0,80
Jasa Perseorangan	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	28,47	29,08	30,06	30,77	31,26	31,90	32,65	33,75	35,43
<b>TOTAL</b>	<b>48,66</b>	<b>49,76</b>	<b>51,11</b>	<b>51,64</b>	<b>52,64</b>	<b>51,87</b>	<b>52,90</b>	<b>53,15</b>	<b>55,85</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah



01.

# Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



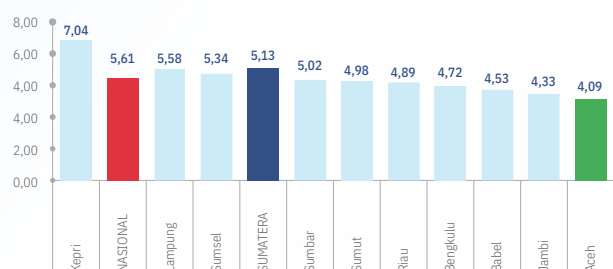


Ekonomi Aceh pulih lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya, seiring berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pada triwulan I 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,61% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Aceh tercermin dari meningkatnya kinerja Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.

## 1.1. Gambaran umum

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,39% (yoy). Sementara itu, ekonomi Sumatera pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,54% (yoy) (Grafik 1.1). Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera, laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw I 2026 (% , yoy)

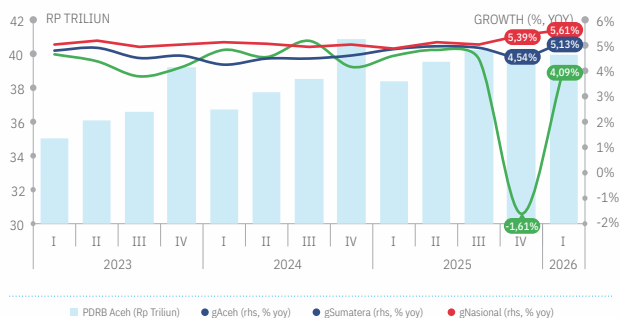


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kinerja Perekonomian Aceh Triwulan I 2026

Pada triwulan laporan, ekonomi Aceh pulih lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya, didorong oleh berbagai upaya akselerasi pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Kinerja ekonomi Aceh pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,09% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 1,61% (yoy) sebagai dampak bencana hidrometeorologi. (Grafik 1.2). Kinerja ekonomi Aceh tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera maupun Nasional.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh terutama didorong oleh peningkatan kinerja LU Konstruksi seiring dengan berlanjutnya proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Administrasi Pemerintah, LU Industri Pengolahan, dan LU Akomodasi, Makanan dan Minuman. Kinerja LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh percepatan pelaksanaan berbagai proyek rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana. Sejalan dengan hal tersebut, LU Administrasi Pemerintah juga mengalami peningkatan yang didukung oleh meningkatkan realisasi belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBA. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan juga menunjukkan peningkatan, antara lain didorong oleh peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) sebagai respons terhadap kenaikan harga CPO dunia.

Di sisi lain, meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, serta bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) dan perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), turut mendorong pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan I 2026 juga didukung oleh peningkatan kinerja dari sisi permintaan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya konsumsi pemerintah, investasi (Pementukan Modal Tetap Bruto/PMTB), dan membaiknya konsumsi rumah tangga.

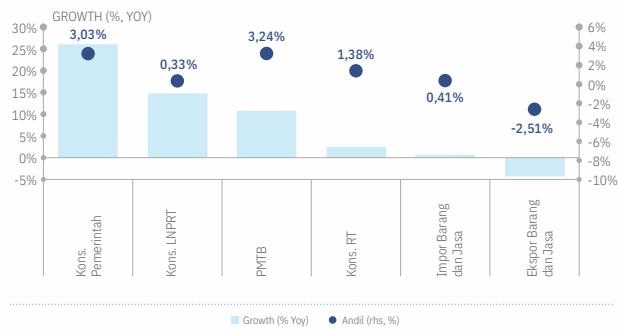
Di tengah perbaikan kinerja ekonomi tersebut, kontribusi ekonomi Aceh terhadap ekonomi Sumatera masih terbatas. Pada triwulan I 2026, kontribusi ekonomi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar 4,88%, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Kontribusi tersebut berada di atas Provinsi Bengkulu (2,10%) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2,26%). Adapun provinsi dengan kontribusi terbesar ke perekonomian Sumatera adalah Sumatera Utara (23,54%), Riau (22,88%), dan Sumatera Selatan (13,71%).

## 1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh terutama bersumber dari tingginya kinerja konsumsi pemerintah, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB), dan perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga. Pada triwulan I 2026, konsumsi pemerintah dan PMTB menjadi sumber utama

terakselerasinya pertumbuhan ekonomi Aceh dengan pertumbuhan sebesar 26,12% (yoy) dan andil pertumbuhan sebesar 3,03% (yoy), disusul oleh PMTB yang tumbuh 10,76% (yoy) dengan andil sebesar 3,24% (yoy), serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,47% (yoy) dengan andil sebesar 1,38% (yoy) (Grafik 1.3). Meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan terutama didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah baik dari APBN dan APBA, untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, kinerja PMTB pada triwulan laporan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Kondisi ini antara lain didukung oleh program pemerintah antara lain perluasan implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis melalui penambahan jumlah SPPG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

**Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan**

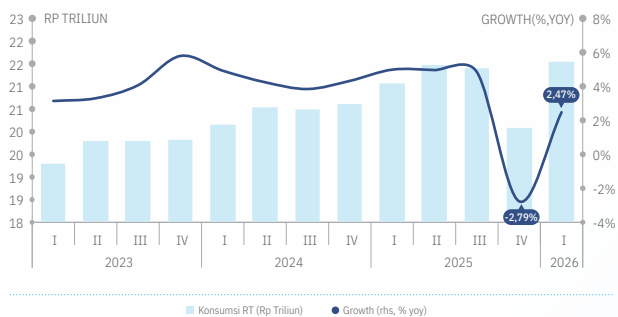


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan I 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar sebesar 2,47% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,79% (yoy) (Grafik 1.4). Perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan HBKN Idulfitri. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga didukung oleh berangsur

**Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT**

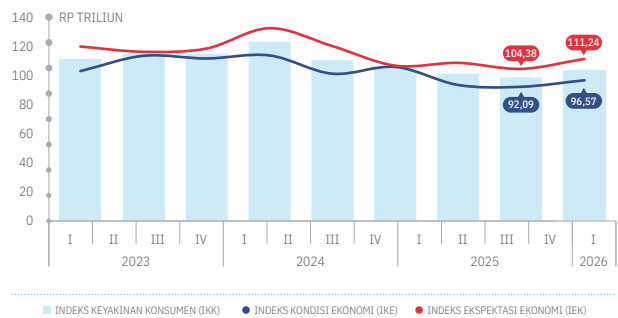


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca bencana hidrometeorologi.

**Membaiknya konsumsi rumah tangga, terindikasi dari hasil survei konsumen Bank Indonesia, yang menunjukkan peningkatan optimisme masyarakat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 103,90, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 98,23. Peningkatan optimisme juga tercermin pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK). IKE meningkat dari 92,09 pada Triwulan IV 2025 menjadi 96,57 pada Triwulan I 2026, sementara IEK naik dari 104,38 menjadi 111,24 pada periode yang sama.

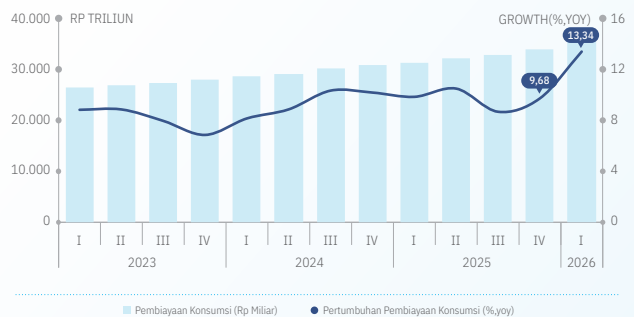
**Grafik 1.5. Perkembangan Survei Konsumen**



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah

**Penguatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari meningkatnya pembiayaan konsumsi.** Pada Triwulan I 2026, pembiayaan konsumsi tumbuh sebesar 13,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 9,68% (yoy) (Grafik 1.6). Peningkatan pembiayaan konsumsi tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk mendukung pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Selain itu, tingginya kebutuhan konsumsi selama bulan Ramadhan dan HBKN Idulfitri turut mendorong peningkatan permintaan pembiayaan oleh masyarakat.

**Grafik 1.6. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi**



Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

## Konsumsi Pemerintah

### Konsumsi pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan I 2026.

Pada periode tersebut, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 25,39% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,86% (yoy). Tingginya pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah baik dari APBN dan APBA, untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Selain itu, pertumbuhan yang tinggi juga dipengaruhi oleh *base effect*, mengingat konsumsi pemerintah pada Triwulan I 2025 tercatat relatif rendah. (Grafik 1.7).

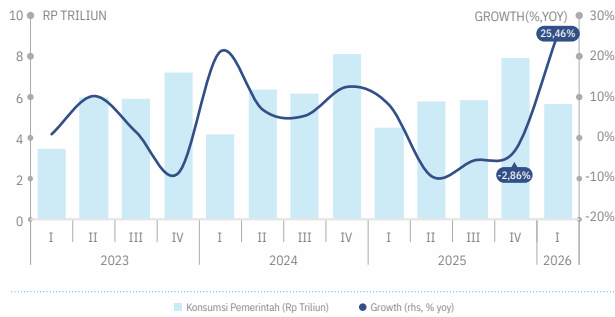
Membbaiknya konsumsi pemerintah pada Triwulan I 2026 juga tercermin pada kinerja LU Administrasi Pemerintah yang tercatat tumbuh sebesar 7,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2025 sebesar 2,91% (yoy) (Grafik 1.8.).

Terakselerasinya kinerja konsumsi pemerintah didorong oleh meningkatnya belanja APBD dan APBN di Aceh pada triwulan laporan. Realisasi Belanja APBD pada triwulan I 2026, tercatat mencapai Rp4,70 Triliun atau sebesar 12,45% dari total pagu anggaran. Angka realisasi tersebut meningkat sebesar 55,94% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp3,01 Triliun. Meningkatnya realisasi belanja APBD pada triwulan laporan, utamanya didorong oleh percepatan realisasi seiring dengan penghapusan syarat salur untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,64T sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59 Tahun 2026 dan Peraturan Meteri Keuangan (PMK) No. 102 Tahun 2025. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan realisasi Belanja utamanya didorong oleh komponen Belanja Pegawai yang tercatat sebesar Rp3,82T, meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,68T atau tumbuh sebesar 35,12% (yoy) (Tabel 1.1.).

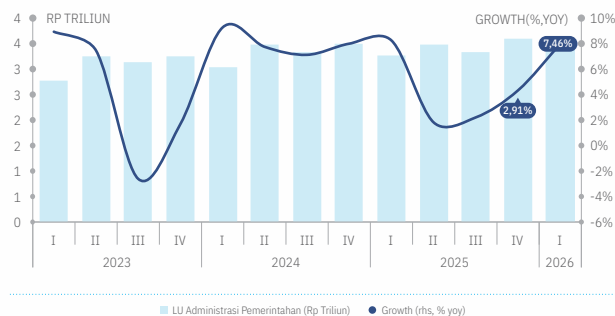
**Tabel 1.1. Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2026**

REALISASI APBD – dalam Triliun Rupiah				
Uraian	2026			Growth Realisasi (% , yoy)
	Pagu APBD	Realisasi s.d. 31 Mar 2026	% Realisasi	
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	37,94	6,20	16,35	98,54
I. Pendapatan Asli Daerah	8,21	0,93	11,42	81,31
Pajak Daerah	2,99	0,41	13,70	53,05
Retribusi Daerah	1,70	0,16	9,88	107,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,43	0,25	58,98	627,06
Lain-lain PAD yang Sah	3,07	0,10	3,32	(22,95)
II. Pendapatan dari Dana Transfer	28,26	5,16	18,29	98,37
III. Lain-lain Pendapatan Daerah	1,46	0,09	6,70	3.788,54
<b>B. BELANJA DAERAH</b>	37,76	4,70	12,45	55,94
I. Belanja Operasi	27,80	3,82	13,75	42,43
Belanja Pegawai	15,92	3,12	19,60	35,12
Belanja Barang dan Jasa	10,55	0,64	6,09	81,40
Belanja Hibah	1,03	0,04	3,91	132,40
Belanja Bantuan Sosial	0,27	0,01	6,55	521,20
II. Belanja Modal	2,86	0,05	1,94	148,50
III. Belanja Tidak Terduga	0,27	0,05	18,95	4.713,64
IV. Belanja Transfer	6,81	0,77	11,32	150,34
Belanja Bagi Hasil	0,78	0,14	18,67	0,75
Belanja Bantuan Keuangan	6,03	0,62	10,36	282,99
<b>C. SURPLUS/DEFISIT</b>	0,17	1,50	844,22	1.276,96
<b>D. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1,27	1,01	79,00	9.539,12
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,29	1,03	80,02	9.801,24
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18,01	0,02	152,53	0,00
<b>E. SILPA</b>	1,45	2,51	-	2.001,41

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), diolah

**Grafik 1.7. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Grafik 1.8. Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Meningkatnya konsumsi pemerintah pada Triwulan I 2026 tercermin dari tingginya pertumbuhan realisasi belanja APBN di Aceh. Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja pemerintah pusat di Aceh tercatat sebesar Rp3,47 triliun atau 20,20% dari total pagu anggaran. Nilai tersebut meningkat sebesar 23,87% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,80 triliun (Tabel 1.2.).

Peningkatan realisasi belanja APBN di Aceh didorong oleh percepatan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Percepatan belanja tersebut sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102 Tahun 2025. Meningkatnya realisasi belanja APBN di Aceh turut memperkuat peran konsumsi pemerintah sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan.

### Pembentukan Modal Tetap Bruto

Kinerja investasi yang tercermin dari PMTB di Aceh meningkat signifikan pada Triwulan I 2026. PMTB tercatat tumbuh sebesar 10,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 3,52% (yoy). Perbaikan kinerja PMTB, menunjukkan mulai menguatkan aktivitas investasi dan pembangunan di Aceh setelah terdampak oleh bencana hidrometeorologi.

**Tabel 1.2. Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2026**

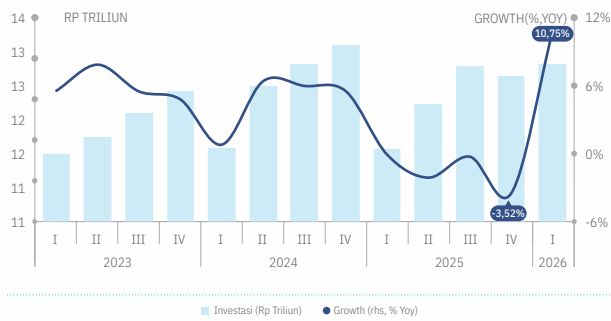
REALISASI BELANJA APBN – dalam Triliun Rupiah				
Uraian	TRIWULAN I 2026			Growth Realisasi (% yoy)
	Target (Pagu) APBN	Real s.d. 31 Maret	% Realisasi	
<b>BELANJA NEGARA</b>	45,77	14,77	32,29	87,47
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	17,18	3,47	20,20	23,87
Belanja Pegawai	9,54	2,62	27,50	21,90
Belanja Barang	4,40	0,61	13,91	2,80
Belanja Modal	3,2	0,23	7,15	530,75
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	28,58	11,30	39,55	122,56
Dana Bagi Hasil	0,85	0,38	44,59	249,11
Dana Alokasi Umum	17,05	5,98	35,07	94,03
Dana Transfer Khusus	4,81	1,45	30,24	85,17
DAK Fisik	0,38	-	-	-
DAK Non-Fisik	4,42	1,45	32,89	85,17
Dana Otonomi Khusus	4,07	2,89	71,01	-
Dana Desa	1,78	0,59	33,23	(46,28)
Dana Insentif Fiskal	-	-	-	-

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), diolah

Terakselerasinya kinerja PMTB terutama didorong oleh percepatan pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuha investasi adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan nasional yang hingga akhir Triwulan I 2026 telah mencapai progres fisik sebesar 11,13%. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut turut mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, sehingga berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi daerah.

Selain itu, pertumbuhan PMTB turut didukung oleh implementasi program pemerintah antara lain perluasan program MBG melalui penambahan SPPG dan pembangunan KDMP di berbagai wilayah. Meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung layanan publik tersebut menjadi indikasi menguatkan investasi, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan.

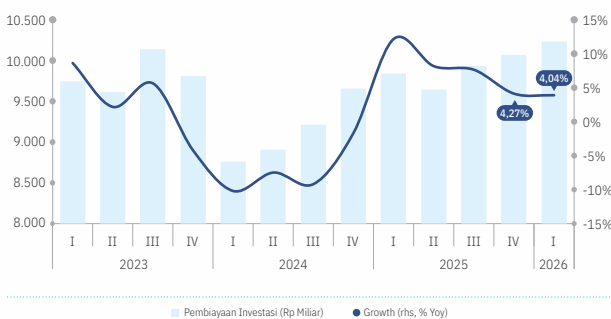
**Grafik 1.9. Pertumbuhan PMTB**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Akselerasi PMTB juga tercermin dari masih tumbuhnya pembiayaan investasi.** Secara tahunan, realisasi pertumbuhan pembiayaan investasi tercatat tumbuh sebesar 4,04% (yoy) pada triwulan laporan, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,27% (yoy).

**Grafik 1.10. Perkembangan Pembiayaan Investasi**



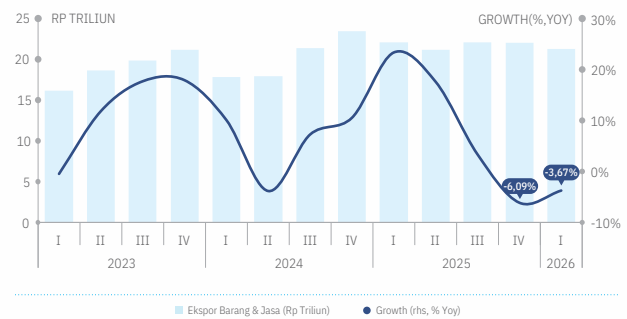
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

## Ekspor Barang dan Jasa

**Kinerja ekspor barang dan jasa Aceh pada triwulan I 2026 masih mengalami kontraksi, meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.** Ekspor Barang dan Jasa Aceh pada triwulan I 2026 terkontraksi sebesar 3,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi cukup dalam sebesar 6,09% (yoy) (Grafik 1.11).

Membaiknya kinerja ekspor tersebut sejalan dengan berangsur pulihnya aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana hidrometeorologi. Selain itu, perbaikan kinerja ekspor batu bara turut memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kinerja ekspor Aceh pada triwulan laporan.

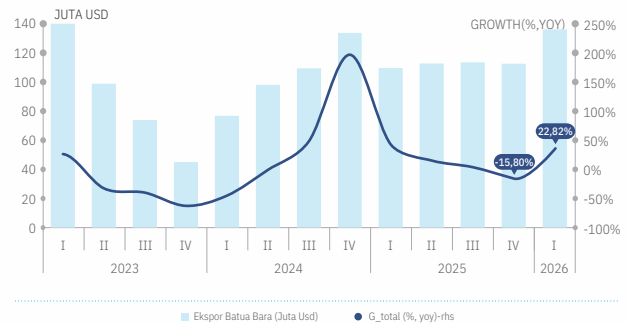
**Grafik 1.11. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Perbaikan kinerja ekspor Aceh pada Triwulan I 2026 terutama didorong oleh meningkatnya ekspor batu bara.** Batu bara memiliki pangsa sebesar 78,96% terhadap total nilai ekspor Aceh, sehingga perkembangan ekspor komoditas ini memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor secara keseluruhan. Pada triwulan laporan, ekspor batu bara tumbuh sebesar 22,82% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 15,80% (Grafik 1.12). Secara nominal, nilai ekspor mencapai US\$127,23 juta pada Triwulan I 2026, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar US\$106,53 juta. Peningkatan ekspor batu bara terutama didorong oleh kembali pulihnya permintaan dari

**Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Batubara**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

negara tujuan ekspor utama Aceh. Selain itu, pelaku usaha batu bara cenderung meningkatkan volume pengiriman lebih awal (*frontloading*), sebagai antisipasi terhadap potensi penerapan kebijakan bea keluar sumber daya alam (SDA) pada Triwulan II 2026.

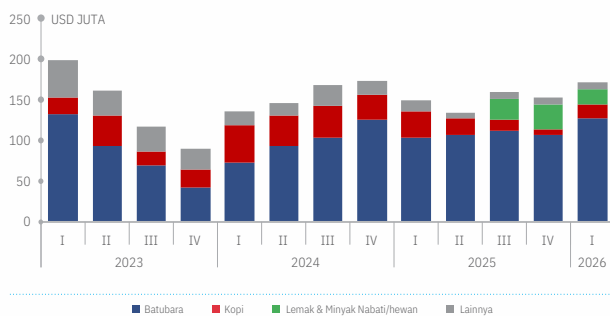
**Kinerja ekspor komoditas utama Aceh selain batu bara menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada Triwulan I 2026.** Ekspor kopi tercatat sebesar US\$17,09 juta, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$7,53 juta, atau meningkat sebesar 126,87% (qtq). Namun demikian, secara tahunan ekspor kopi masih tercatat turun dari US\$32,14 juta pada triwulan I 2025 menjadi US\$17,09 juta pada triwulan I 2026, atau berkontraksi sebesar 46,82% (yoy).

Sementara itu, ekspor lemak dan minyak nabati/hewani (CPO) pada triwulan laporan tercatat sebesar US\$18,54 juta. Adapun ekspor komoditas lainnya yang umumnya terdiri dari rempah-rempah, pupuk, produk kimia, serta produk nabati lainnya tercatat sebesar US\$8,43 juta, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$7,86 juta, atau meningkat sebesar 7,32% (qtq).

Secara tahunan, ekspor komoditas lainnya tercatat turun dari US\$13,82 juta pada triwulan I 2025 menjadi US\$8,43 juta pada triwulan I 2026, atau berkontraksi sebesar 38,98% (yoy) (Grafik 1.13).

Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kinerja ekspor Aceh masih berlangsung secara bertahap, beberapa komoditas ekspor mulai mencatatkan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor secara tahunan masih menghadapi tantangan, terutama belum pulihnya permintaan global dan proses pemulihan produksi pascabencana hidrometeorologi.

**Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh**

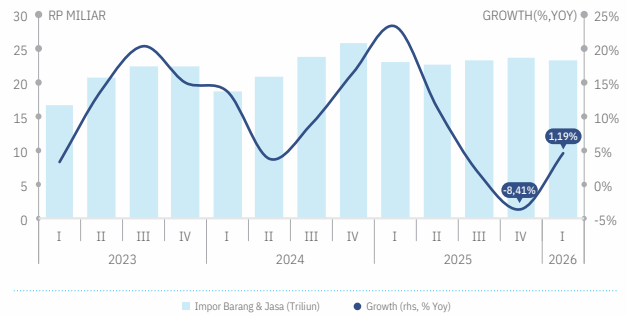


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

## Impor Barang dan Jasa

**Kinerja impor barang dan jasa secara tahunan kembali tumbuh positif pada triwulan laporan.** Pada triwulan I 2026, impor barang dan jasa tumbuh sebesar 1,19% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 8,41% (yoy) (Grafik 1.14).

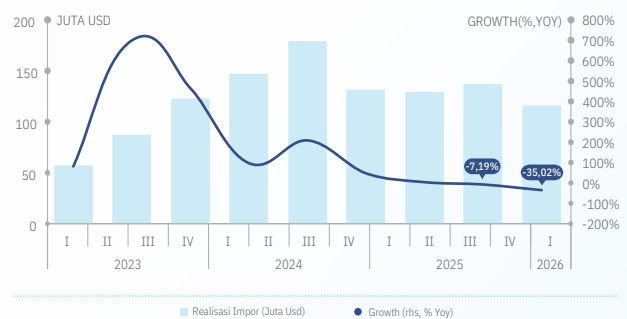
**Grafik 1.14. Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Impor Provinsi Aceh pada triwulan I 2026 didominasi oleh impor migas.** Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai realisasi impor Aceh pada triwulan I 2026 sebesar US\$116,76 juta, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar US\$136,86 juta (Grafik 1.15). Secara tahunan, realisasi impor tercatat berkontraksi sebesar 0,35% (yoy). Impor Aceh didominasi oleh impor minyak dan gas dengan pangsa sebesar 53,31% dari total impor, disusul oleh komoditas pupuk (pangsa 30,38%), dan bahan kimia anorganik (pangsa 17,56%).

**Grafik 1.15. Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

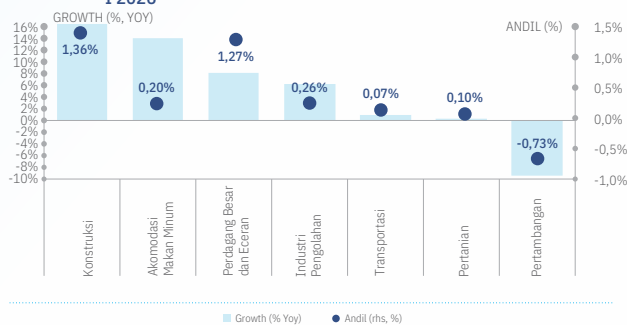
## 1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan I 2026 didorong oleh membaiknya sejumlah LU strategis. LU Konstruksi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dengan pertumbuhan sebesar 15,95% (yoy),

seiring dengan berlanjutnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Selain itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 13,54% (yoy), didukung oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan HBKN Idulfitri.

Di sisi lain, kinerja LU Pertambangan masih mengalami kontraksi sebesar 9,05% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian yang memiliki pangsa terbesar terhadap ekonomi Aceh (31,70% dari total PDRB) tercatat tumbuh terbatas sebesar 0,35% (yoy) (Grafik 1.16).

**Grafik 1.16. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan I 2026**



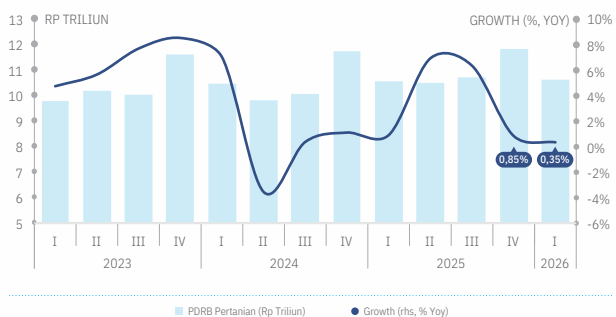
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja LU Pertanian pada Triwulan I 2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang terbatas akibat dampak lanjutan bencana hidrometeorologi. LU Pertanian pada triwulan I 2026 hanya tumbuh sebesar 0,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,85% (yoy) (Grafik 1.17).

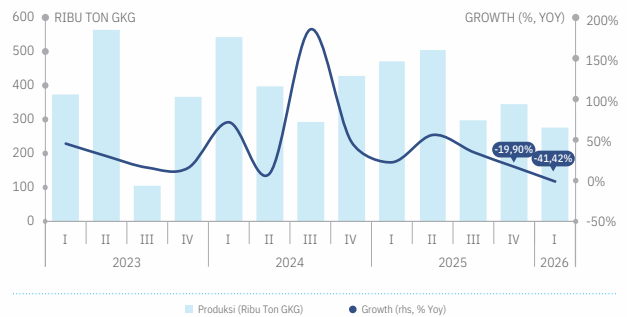
Terbatasnya pertumbuhan LU Pertanian terutama disebabkan oleh terganggunya aktivitas produksi pada beberapa wilayah terdampak bencana, yang memengaruhi produktivitas sejumlah komoditas pertanian. Meskipun demikian, LU Pertanian masih

**Grafik 1.17. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Grafik 1.18. Perkembangan Produksi Padi**

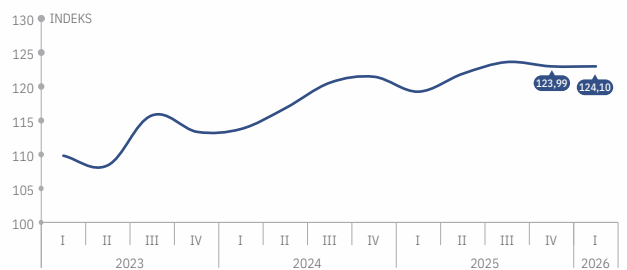


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

mampu mencatatkan pertumbuhan positif yang ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan tahunan, khususnya komoditas yang tetap berproduksi di wilayah yang tidak terdampak bencana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertanian di Aceh mulai berangsur pulih, meskipun proses pemulihan masih berlangsung dan belum merata di seluruh wilayah.

Di sisi lain, perbaikan mulai terlihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan. NTP pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 124,10, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 123,99 (Grafik 1.19.). Peningkatan nilai NTP disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).

**Grafik 1.19. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)**

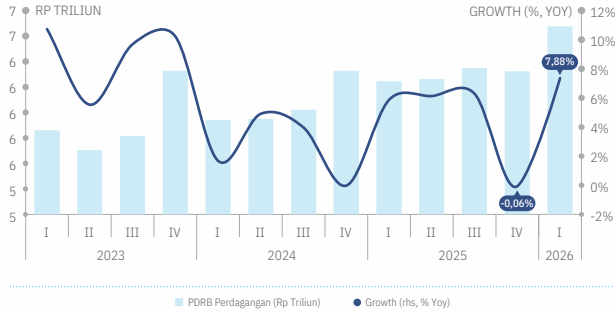


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan, sejalan dengan pemulihan aktivitas konsumsi masyarakat pascabencana. Pada triwulan I 2026, LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat tumbuh sebesar 7,88% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,06% (yoy) (Grafik 1.20.).

**Grafik 1.20. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan**

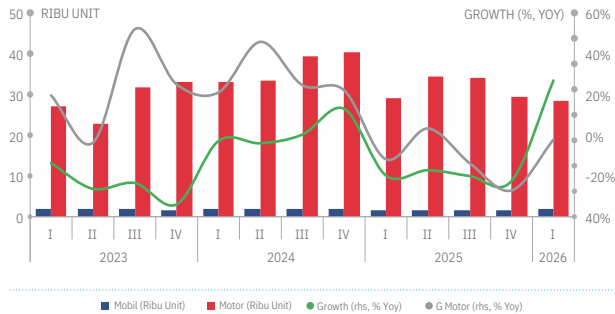


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Meningkatnya kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran utamanya didorong oleh pemulihan aktivitas konsumsi rumah tangga serta pulihnya kembali jalur distribusi utama di Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Meningkatnya kinerja LU Perdagangan juga tercermin pada membaiknya pertumbuhan penjualan kendaraan baru pada triwulan I 2026. Penjualan mobil baru pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 26,90% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 22,42% (yoy) (Grafik 1.21).

**Grafik 1.21. Pertumbuhan Penjualan Kendaraan**

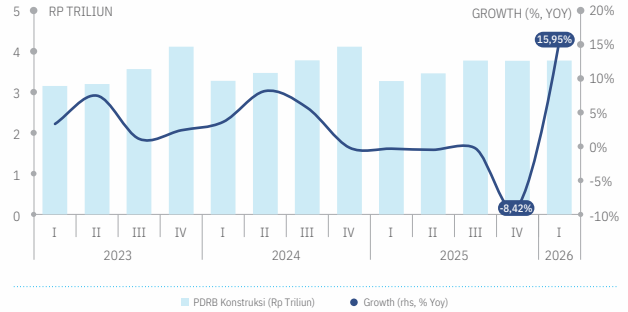


Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

## Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tumbuh signifikan, sejalan dengan meningkatnya kinerja investasi. Pada triwulan I 2026, LU Konstruksi tercatat tumbuh sebesar 15,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 8,42% (yoy) (Grafik 1.22). Akselerasi kinerja LU Konstruksi utamanya didorong oleh progres rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur daerah terdampak bencana hidrometeorologi pada triwulan laporan, serta pelaksanaan program pemerintar antara lain pembangunan SPPG dan KDMP.

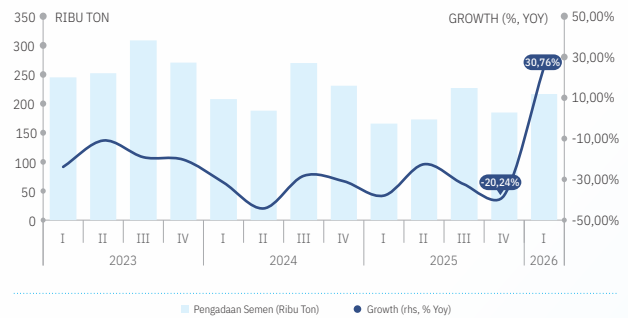
**Grafik 1.22. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Akselerasi kinerja LU Konstruksi tercermin dari meningkatnya pengadaan semen pada triwulan I 2026. Pengadaan semen pada triwulan laporan tercatat sejumlah 217.842,81 ton, meningkat sebesar 30,76% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 20,24% (yoy).

**Grafik 1.23. Perkembangan Pengadaan Semen**



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Akselerasi LU Konstruksi juga sejalan dengan meningkatnya kinerja investasi di Aceh. Kinerja PMTB Aceh pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 10,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 3,52% (yoy) (Grafik 1.24).

**Grafik 1.24. Pertumbuhan PMTB**

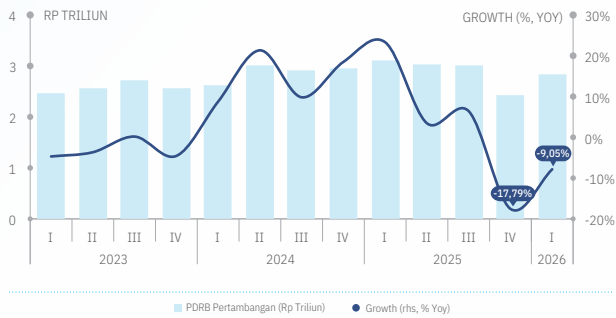


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Lapangan Usaha Pertambangan

LU Pertambangan pada triwulan I 2026 masih mengalami kontraksi, meskipun tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, LU Pertambangan tercatat berkontraksi sebesar 9,05% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi cukup dalam sebesar 17,79% (yoy) (Grafik 1.25). Perbaikan ini sejalan dengan kembali meningkatnya ekspor batu bara pada triwulan laporan sebesar 22,82% (yoy) (Grafik 1.12). Namun demikian, kinerja LU Pertambangan secara keseluruhan masih berkontraksi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum pulihnya produksi pada subsektor minyak dan gas.

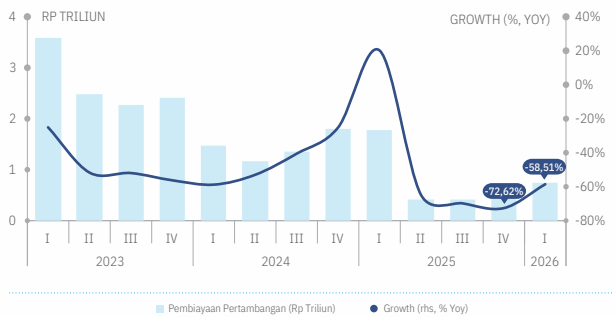
**Grafik 1.25. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Masih berkontraksinya kinerja LU Pertambangan juga tercermin dari masih berkontraksinya kinerja pembiayaan sektor pertambangan. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan sektor tambang secara tahunan tercatat berkontraksi sebesar -58,51% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 72,62% (yoy) (Grafik 1.26).

**Grafik 1.26. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan**



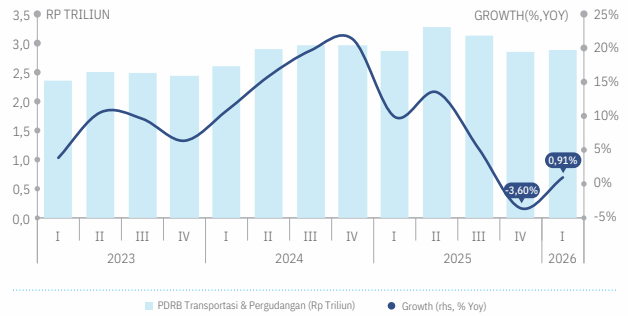
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

## Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Pemulihan jalur logistik pascabencana mendorong kembali tumbuhnya LU Transportasi dan Pergudangan. Pada triwulan I 2026, LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh

sebesar 0,91% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 3,60% (yoy) (Grafik 1.27). Membaiknya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan pulihnya kembali jalur logistik utama di Aceh pascabencana hidrometeorologi.

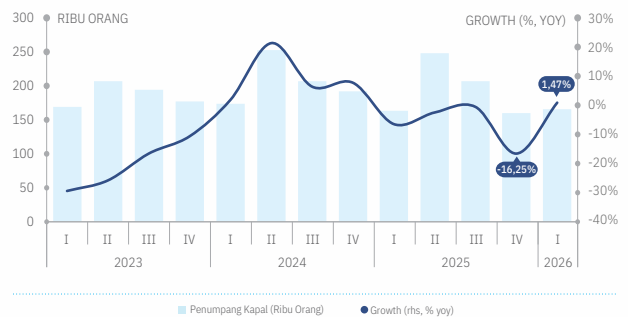
**Grafik 1.27. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Membaiknya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan juga tercermin pada meningkatnya pertumbuhan jumlah penumpang angkutan laut. Pada triwulan I 2026, jumlah penumpang kapal (penumpang naik dan penumpang turun) di Pelabuhan Ulee Lheue tumbuh sebesar 1,47% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 16,25% (yoy). (Grafik 1.28).

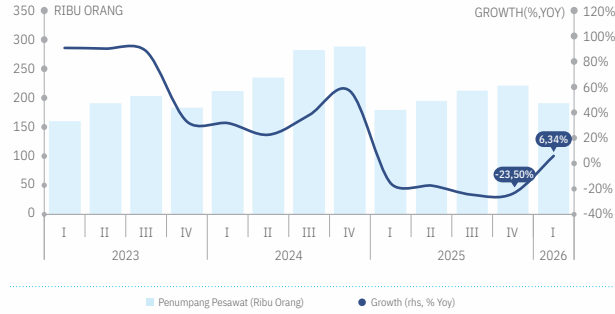
**Grafik 1.28. Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

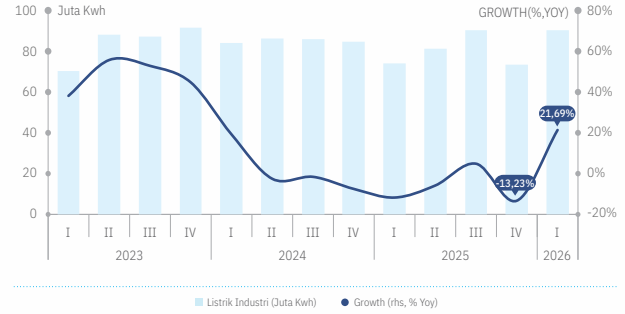
Pemulihan aktivitas pascabencana turut mendorong kembali tumbuhnya jumlah penumpang pesawat. Pada triwulan I 2026, jumlah penumpang pesawat (berangkat dan datang) di Bandara Sultan Iskandar Muda mencapai 192,70 ribu orang atau tumbuh sebesar 6,34% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 23,50% (yoy). Peningkatan jumlah penumpang pesawat dan penumpang kapal juga didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada HBKN Idulfitri (Grafik 1.28).

**Grafik 1.29. Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Grafik 1.31. Perkembangan Konsumsi Listrik Industri**

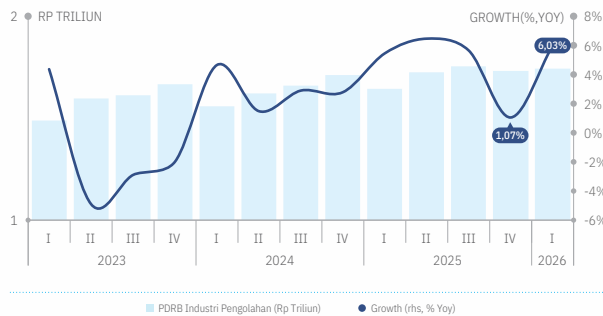


Sumber: Perusahaan Listrik Negara, diolah

## Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 6,03% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,07% (yoy) (Grafik 1.30). Peningkatan tersebut sejalan dengan pulihnya kembali distribusi bahan baku dan bahan antara untuk industri pengolahan, serta normalisasi pasokan listrik dan bahan bakar pascabencana hidrometeorologi, baik pada industri besar maupun industri kecil menengah.

**Grafik 1.30. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan**

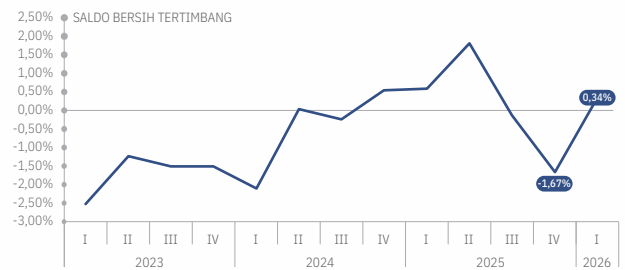


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan juga tercermin dari meningkatnya konsumsi listrik industri.** Konsumsi listrik industri pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 21,69% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 13,23% (yoy) (Grafik 1.30).

**Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,34%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -1,67% (Grafik 1.32).

**Grafik 1.32. Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan**

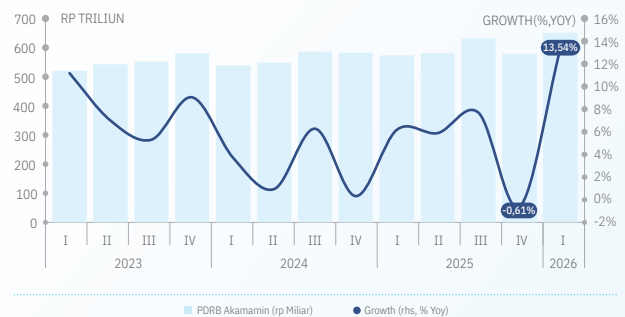


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

## Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

**Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tercatat meningkat signifikan pada triwulan laporan.** Pada triwulan I 2026, angka pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman tumbuh sebesar 13,54% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,61% (yoy) (Grafik 1.33). Peningkatan tersebut sejalan dengan pemulihan aktivitas masyarakat serta normalisasi pasokan listrik dan bahan bakar gas pada usaha penyedia akomodasi dan makan minum pascabencana hidrometeorologi.

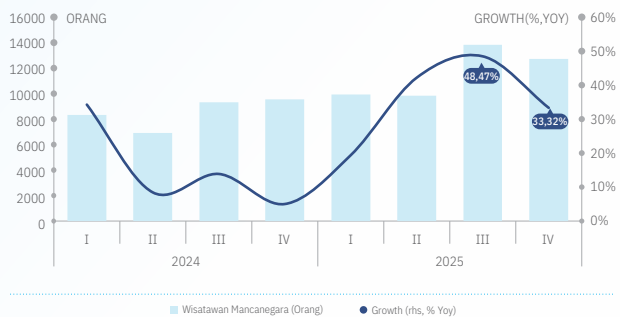
**Grafik 1.33. Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja LU Akmamin juga sejalan dengan masih tumbuhnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 12.725 wisatawan, atau tumbuh 33,32% (yoy) (Grafik 1.34).

**Grafik 1.34. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**BOKS 1**

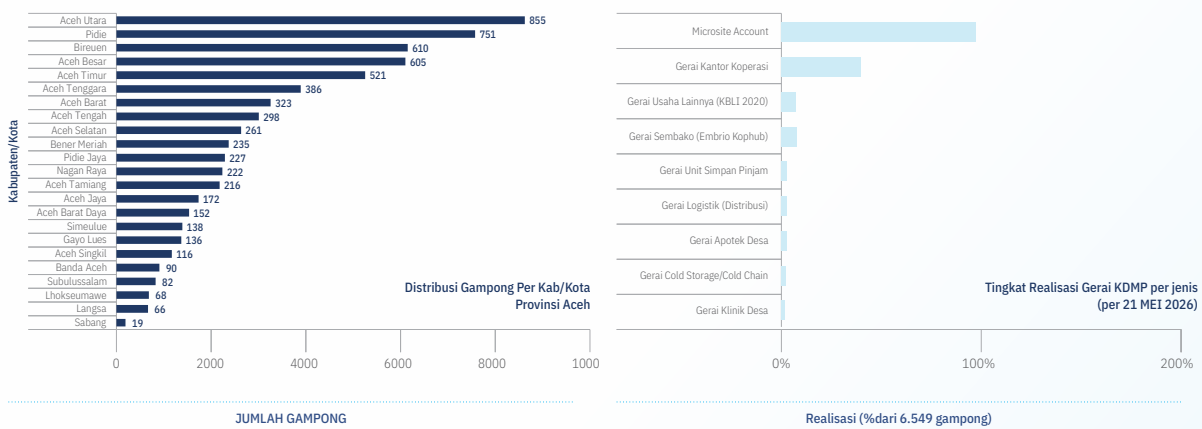
**Perkembangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Aceh**

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi di tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Setiap koperasi memperoleh dukungan pendanaan dengan plafon maksimal sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan gedung koperasi serta penyediaan modal kerja dan sarana operasional. KDMP dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa melalui pengembangan delapan jenis gerai usaha, yaitu Gerai Sembako (Embrio Kophub), Gerai Apotek Desa, Gerai Kantor Koperasi, Gerai Unit Simpan Pinjam, Gerai Klinik Desa, Gerai Cold Storage/Cold Chain, Gerai Logistik (Distribusi), dan Gerai Usaha Lainnya, serta pengembangan *Microsite Account* sebagai identitas digital koperasi. Provinsi Aceh dengan jumlah 6.549 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota merupakan salah satu provinsi dengan potensi cakupan KDMP yang signifikan.

Berdasarkan rekapitulasi data KDMP aktif Provinsi Aceh per 21 Mei 2026, kabupaten dengan jumlah gampong terbanyak yang berpotensi mengembangkan KDMP adalah Kabupaten Aceh Utara dengan 855 gampong, Kabupaten Pidie sebanyak 751 gampong, Kabupaten Bireuen sebanyak 610 gampong, dan Kabupaten Aceh Besar sebanyak 605 gampong.

Pada tahap awal pelaksanaan, capaian tertinggi tercatat pada penyelesaian *Microsite Account* sebesar 97,54% dan Gerai Kantor Koperasi sebesar 39,40% dari total gampong di Aceh. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan administratif dan identitas digital koperasi telah berjalan dengan baik. Untuk jenis gerai operasional, tingkat realisasi tercatat pada Gerai Usaha Lainnya sebesar 7,45%, Gerai Sembako sebesar 7,15%, Gerai Unit Simpan Pinjam sebesar 2,99%, Gerai Logistik sebesar 2,50%, Gerai Apotek Desa sebesar 2,20%, Gerai Cold Storage/Cold Chain sebesar 1,91%, dan Gerai Klinik Desa sebesar 1,79%. Pelaksanaan program KDMP di Aceh sejalan dengan momentum positif sektor terkait, khususnya pada LU Konstruksi yang tumbuh sebesar 15,94% (yoy) pada triwulan I 2026, yang antara lain didorong oleh aktivitas pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk pengembangan unit koperasi desa. Ke depan, akselerasi tahap operasional KDMP berpotensi turut mendukung kinerja berbagai lapangan usaha (LU) di Aceh, khususnya pada sektor Perdagangan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Keuangan, melalui pengembangan jaringan distribusi pangan, akses layanan kesehatan, dan akses pembiayaan di tingkat desa.

**Grafik B.1. Perkembangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Di Aceh**



02.

# Perkembangan Inflasi Daerah



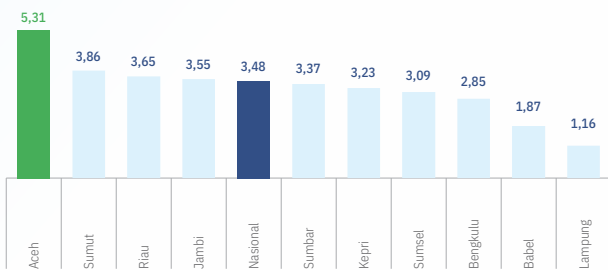


Inflasi Aceh pada pada triwulan I 2026 masih tinggi namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 5,34% (yoy), melandai jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang menyentuh level 6,71% (yoy). Membaiknya tekanan inflasi sejalan dengan mulai pulihnya jalur distribusi pascabencana di tengah dorongan permintaan yang meningkat pada bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.

## 2.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Aceh pada triwulan I 2026 masih tinggi namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 5,31% (yoy) pada triwulan I tahun 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang mencapai 6,71% (yoy), namun masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48% (yoy). Capaian ini menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional, diikuti oleh Kalimantan Selatan (4,83% yoy), Sulawesi Selatan (4,50% yoy), dan Nusa Tenggara Barat (4,09% yoy).

Grafik 2.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan I 2026 (% yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tabel 2.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026

Inflasi		Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Tarif Listrik	0,89	Cabai Merah	0,18
Emas Perhiasan	0,86	Kentang	0,09
Beras	0,80	Bawang Putih	0,06
Nasi Dengan Lauk	0,46	Baju Muslim Wanita	0,05
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,22	Cabai Rawit	0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Masih tingginya tekanan inflasi pada triwulan laporan didorong oleh faktor musiman (*seasonal*) bulan Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H yang memicu lonjakan permintaan masyarakat. Di saat yang bersamaan, *supply chain* dan kapasitas produksi pangan daerah belum pulih sepenuhnya pascabencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Hambatan distribusi logistik juga masih terjadi akibat ketergantungan pada jembatan *bailey* yang memiliki kapasitas angkut terbatas.

Dilihat dari komoditasnya, inflasi tahunan Aceh didorong oleh normalisasi tarif listrik, harga emas perhiasan, dan komoditas pangan. Andil inflasi dari tarif listrik lebih dipengaruhi oleh *low base effect* akibat penerapan diskon tarif pada triwulan I 2025. Sementara itu, tren kenaikan harga emas perhiasan yang terus

berlanjut sejak akhir tahun 2025 dipicu oleh eskalasi geopolitik global di Timur Tengah, yang mendorong peralihan preferensi investor ke instrumen *safe haven*. Di sisi lain, dari komoditas pangan, fenomena *price rigidity* terjadi pada komoditas nasi dengan lauk yang harganya cenderung sulit untuk turun. Kondisi ini merupakan *second-round effect* dari lonjakan harga komoditas pangan akibat bencana pada akhir tahun 2025 yang mengganggu kegiatan produksi.

## 2.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Perkembangan inflasi pada triwulan I tahun 2026 secara agregat didorong oleh harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatatkan andil tertinggi mencapai 2,03%. Peningkatan tingkat harga tersebut juga disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan kontribusi sebesar 1,07%. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan dorongan inflasi lebih lanjut, dengan sumbangan masing-masing sebesar 0,98% dan 0,92%. Di sisi lain, laju inflasi secara umum berhasil ditahan oleh pergerakan pada kelompok pendidikan yang mengalami tingkat deflasi sebesar 0,11%.

Berdasarkan rincian pembentuknya, kenaikan harga paling besar pada periode laporan bersumber dari tarif listrik, emas perhiasan, beras, nasi dengan lauk, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sebaliknya, tekanan inflasi dapat ditahan oleh penurunan harga pada sejumlah komoditas cabai merah, kentang, bawang putih, baju muslim wanita, dan cabai rawit.

Tabel 2.2. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Barang dan Jasa	Tw IV 2025		Tw I 2026	
	Inflasi (%yoy)	Andil (%yoy)	Inflasi (%yoy)	Andil (%yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	12,47	4,62	5,36	2,03
Pakaian dan Alas Kaki	1,59	0,09	0,90	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,04	0,33	7,16	1,07
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,46	0,02	1,36	0,05
Kesehatan	3,92	0,07	2,40	0,04
Transportasi	2,28	0,23	1,29	0,13
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,04	-0	0,75	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,29	0,02	0,97	0,01
Pendidikan	-0,16	-0,01	-0,11	-0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	4,03	0,43	9,12	0,98
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	16,02	0,91	15,78	0,92
<b>Inflasi Umum</b>	<b>6,71</b>		<b>5,31</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami penurunan. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 5,36% (yoy) pada triwulan I tahun 2026, lebih rendah dibanding triwulan IV 2025 yang mencapai 12,47% (yoy). Secara agregat, kelompok ini memberikan andil sebesar 2,03% terhadap inflasi umum Aceh.

Peningkatan tekanan harga pada kelompok ini bersumber dari komoditas pangan strategis, dengan beras sebagai kontributor terbesar yaitu sebesar 0,80%. Kenaikan harga komoditas beras sebagai dampak dari bencana pada akhir tahun 2025 yang menyebabkan terganggunya aktivitas produksi di wilayah sentra produksi Aceh. Hal ini juga berdampak terhadap komoditas pangan lainnya. Di samping itu, produk olahan tembakau juga memberikan dorongan inflasi, tecermin dari andil Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,22% dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 0,14%. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam ras dengan andil 0,18% dan udang basah (0,16%).

Meskipun demikian, laju inflasi pada kelompok ini tertahan oleh adanya penurunan harga pada beberapa komoditas hortikultura. Cabai merah menjadi penyumbang deflasi utama pada periode laporan dengan andil sebesar 0,18%, diikuti oleh kentang dan bawang putih yang masing-masing menahan laju inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,09% dan 0,06%. Kondisi deflasi ini juga didorong oleh normalisasi harga pada komoditas bumbu-bumbuan lainnya, seperti cabai rawit (0,04%) dan bawang merah (0,03%), serta pasokan komoditas perikanan yang menyumbang andil deflasi 0,03%.

**Tabel 2.3. Inflasi Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau**

Inflasi 5,36% (yoy)		Andil 2,03%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Beras	0,80	Cabai merah	-0,18
Sigaret Kretek Mesin	0,22	Kentang	-0,09
Daging ayam ras	0,18	Bawang putih	-0,06
Udang basah	0,16	Cabai rawit	-0,04
Sigaret Kretek Tangan	0,14	Bawang merah	-0,03
Minyak goreng	0,09	Ikan biji angka / Ikan kuniran	-0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Laju inflasi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Aceh berada pada level yang relatif stabil. Kelompok ini mencatatkan tingkat inflasi tahunan sebesar 0,90% (yoy) dengan andil terhadap pembentukan inflasi umum sebesar 0,05%.

Berdasarkan rincian komoditasnya, inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan harga pada segmen pakaian dan perlengkapan anak. Baju anak setelan menjadi pendorong utama dengan andil inflasi sebesar 0,03%, disusul oleh komoditas seragam sekolah anak yang memberikan kontribusi sebesar 0,02%. Peningkatan harga juga dialami oleh beberapa komoditas sandang lainnya, meliputi baju kaos tanpa kerah/t-shirt anak, pakaian bayi, sandal anak, serta sepatu anak, di mana masing-masing komoditas tersebut mencatatkan andil inflasi sebesar 0,01%.

Di sisi lain, tingkat inflasi pada kelompok ini tidak mengalami peningkatan yang lebih tinggi karena adanya deflasi pada beberapa komoditas. Penurunan harga terdalam dicatatkan oleh komoditas baju muslim wanita, sebagai penyumbang deflasi utama, dengan andil sebesar 0,05%. Kondisi tersebut juga didukung oleh penyesuaian harga pada komoditas celana panjang katun anak, yang ikut menahan laju inflasi kelompok ini dengan memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,01% pada periode pelaporan.

**Tabel 2.4. Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki**

Inflasi 0,90% (yoy)		Andil 0,05%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Baju anak stelan	0,03	Baju muslim wanita	-0,05
Seragam sekolah anak	0,02	Celana panjang katun anak	-0,01
Baju kaos tanpa kerah / t-shirt anak	0,01		
Pakaian bayi	0,01		
Sandal anak	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mencatatkan tingkat inflasi sebesar 7,16% secara tahunan. Secara agregat, pergerakan harga pada kelompok ini menyumbang andil terhadap inflasi umum sebesar 1,07%.

Tekanan harga yang terjadi pada kelompok ini didorong oleh komponen tarif listrik, yang menjadi pendorong utama dengan kontribusi inflasi mencapai 0,89% (yoy). Kenaikan harga lebih lanjut juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya pada komponen jasa pemeliharaan, energi rumah tangga, serta material bangunan. Secara terperinci, hal ini terlihat dari andil inflasi komoditas tukang bukan mandor sebesar 0,06% dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03%. Selain itu, komoditas bahan bangunan turut memberikan sumbangan lebih lanjut, di mana Pasir, serta Semen dan Batu Bata/Batu Tala masing-masing memberikan andil sebesar 0,02%.

**Tabel 2.5. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar**

Inflasi 7,16 (yoy)		Andil 1,07	
Penyumbang Inflasi			
Komoditas	Andil (%)		
Tarif Listrik	0,89		
Tukang Bukan Motor	0,06		
Bahan Bakar RT	0,03		
Pasir	0,02		
Semen dan Batu Bata/ Bata Tela	0,02		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga menunjukkan tingkat inflasi sebesar **1,36% secara tahunan (yoy)**. Pergerakan harga pada kelompok ini memberikan kontribusi sebesar 0,05% terhadap pembentukan inflasi umum. Peningkatan harga pada kelompok ini didorong oleh sejumlah komoditas yaitu kulkas/lemari es, mesin cuci, ember, dan panci menjadi komponen penyumbang inflasi, di mana masing-masing komoditas tersebut mencatatkan besaran andil yang identik, yakni sebesar 0,01%. Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok ini sebagian ditahan oleh penurunan harga pada komoditas detergen cair dengan kontribusi deflasi sebesar 0,01%.

**Tabel 2.6. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT**

Inflasi 1,36% (yoy)		Andil 0,05%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Kulkas/Lemari Es	0,01	Detergen Cair	0,01
Mesin Cuci	0,01		
Ember	0,01		
Panci	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### Kel. Kesehatan

Pada Kelompok Kesehatan, inflasi tahunan (yoy) tercatat sebesar **2,40% pada triwulan I tahun 2026**. Secara agregat, kelompok pengeluaran ini memberikan kontribusi dengan andil sebesar 0,04% terhadap inflasi umum. Perkembangan harga di dalam kelompok ini didorong oleh kenaikan pada produk farmasi dan biaya layanan medis. Komoditas vitamin, obat dengan resep, serta tarif *check up* menjadi komponen utama pendorong inflasi, dengan masing-masing mencatatkan besaran andil yang sama sebesar 0,01%.

**Tabel 2.7. Inflasi Kel. Kesehatan**

Inflasi 2,40% (yoy)		Andil 0,04%	
Penyumbang Inflasi			
Komoditas	Andil (%)		
Vitamin	0,01		
Obat dengan Resep	0,01		
Tarif Check Up	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### Kel. Transportasi

Realisasi inflasi tahunan tercatat sebesar **1,29% pada triwulan I tahun 2026 untuk Kelompok Transportasi**. Secara agregat, pergerakan harga pada kelompok ini memberikan kontribusi sebesar 0,13% terhadap inflasi umum Aceh. Faktor utama yang mendorong peningkatan harga di dalam kelompok ini berasal dari biaya perawatan kendaraan, harga kendaraan roda empat, serta tarif transportasi udara. Pergerakan tersebut ditunjukkan oleh andil komoditas pemeliharaan/service, mobil, dan angkutan udara dengan kontribusi inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Dorongan inflasi juga berasal dari komoditas sepeda motor serta tarif angkutan antar kota dengan andil masing-masing sebesar 0,01%. Kenaikan pada tarif angkutan udara disebabkan penyesuaian *fuel surcharge* oleh pemerintah maksimal 38% secara nasional akibat peningkatan harga avtur global, yang merupakan dampak dari konflik US-Iran. Kenaikan harga avtur berdasarkan *posting price* Pertamina untuk Bandara Sultan Iskandar Muda untuk Avtur sebesar 0,27%. Sebaliknya, tekanan inflasi pada kelompok ini berhasil diredam oleh penurunan harga pada komoditas bensin yang mencatatkan andil deflasi sebesar 0,02%.

**Tabel 2.8. Inflasi Kel. Transportasi**

Inflasi 1,29% (yoy)		Andil 0,13%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Pemeliharaan/Service	0,04	Bensin	0,02
Mobil	0,04		
Angkutan Udara	0,04		
Sepeda Motor	0,01		
Angkutan Antar Kota	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Dari Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, realisasi inflasi secara tahunan tercatat sebesar **0,75% pada triwulan I tahun 2026**. Pergerakan harga pada kelompok ini memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap pembentukan inflasi umum, dengan total andil sebesar 0,03%. Peningkatan harga di dalam kelompok ini dipengaruhi oleh pergerakan harga pada komoditas perangkat keras komunikasi dan teknologi.

Komoditas telepon seluler menjadi pendorong utama dengan mencatatkan andil inflasi sebesar 0,02%. Dorongan inflasi selanjutnya disumbang oleh komoditas laptop/notebook yang memberikan kontribusi sebesar 0,01%.

**Tabel 2.9. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**

Inflasi 0,75% (yoy)		Andil 0,03%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Telepon Seluler	0,02	Tidak Dipublikasi	
Laptop/Notebook	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Pada kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, tingkat inflasi secara tahunan tercatat pada level 0,97%. Secara keseluruhan, kelompok pengeluaran ini memberikan andil sebesar 0,01% terhadap laju inflasi umum. Kenaikan harga di dalam kelompok ini utamanya bersumber dari komoditas buku tulis bergaris serta rekreasi sebagai komponen pendorong inflasi, di mana masing-masing komoditas mencatatkan andil sebesar 0,01%. Sebaliknya, tekanan harga ditahan oleh tren penurunan harga komoditas mainan anak, yang bertindak sebagai faktor penahan laju inflasi dengan sumbangan deflasi sebesar -0,01%.

**Tabel 2.10. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya**

Inflasi 0,97% (yoy)		Andil 0,01%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Buku Tulis Bergaris	0,01	Mainan Anak	-0,01
Rekreasi	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Pendidikan

Berbeda dengan tren pada mayoritas kelompok pengeluaran lainnya, Kelompok Pendidikan justru mencatatkan deflasi sebesar 0,11% secara tahunan. Secara agregat, pergerakan harga pada kelompok ini memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap laju inflasi umum, dengan estimasi andil yang mendekati 0%. Berdasarkan komponen di dalamnya, masih terdapat tekanan harga yang bersumber dari Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini. Namun demikian, tekanan tersebut

**Tabel 2.11. Inflasi Kel. Pendidikan**

Inflasi -0,11% (yoy)		Andil ~0%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Paud		Pendidikan Menengah	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

tertahan oleh penurunan harga pada tingkat Pendidikan Menengah yang bertindak sebagai komponen deflasi, sehingga secara umum kelompok pendidikan mencatatkan deflasi.

## Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, tingkat inflasi tahunan tercatat mencapai level 9,12%. Secara agregat, kelompok pengeluaran ini menyumbang andil sebesar 0,98% terhadap inflasi umum. Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga pada berbagai komoditas makanan siap saji. Komoditas nasi dengan lauk menjadi kontributor utama dengan andil inflasi mencapai 0,46%. Tingginya kenaikan harga komoditas tersebut merupakan second-round effect dari lonjakan harga bahan pangan pascabencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Di sisi lain, komoditas nasi dengan lauk juga mengindikasikan adanya fenomena price rigidity, yang mana harga di tingkat konsumen cenderung sulit mengalami penurunan. Lebih lanjut, kenaikan harga turut dipicu oleh pergerakan pada komoditas mie dan bakso siap santap, yang masing-masing menyumbang andil sebesar 0,09% dan 0,08%. Laju inflasi kelompok ini juga semakin didorong oleh kenaikan harga pada sayur olahan (andil 0,07%) serta ketupat/lontong sayur (andil 0,06%).

**Tabel 2.12. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**

Inflasi 9,12% (yoy)		Andil 0,98%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Nasi Dengan Lauk	0,46	Tidak Dipublikasi	
Mie	0,09	Tidak Dipublikasi	
Bakso Siap Santap	0,08	Tidak Dipublikasi	
Sayur Olahan	0,07		
Ketupat/Lontong Sayur	0,06		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, perkembangan harga secara tahunan (yoy) menunjukkan tingkat inflasi yang cukup tinggi, yakni mencapai 15,78%. Secara keseluruhan, pergerakan pada kelompok ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan inflasi umum, yaitu total andil tercatat sebesar 0,92%.

Tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh pergerakan harga komoditas emas perhiasan, yang tercatat sebagai penyumbang utama dengan andil mencapai 0,86%. Tren kenaikan harga pada komoditas ini sejalan dengan melonjaknya harga emas global akibat eskalasi tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ketidakpastian tersebut memicu pergeseran preferensi investor yang mengalihkan portofolio asetnya pada instrumen *safe haven*. Rata-rata harga emas dunia

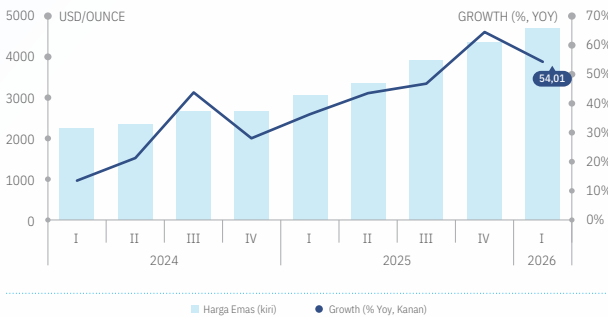
pada triwulan I 2026 telah menyentuh level 4.677,3 USD/t.oz. Level harga tersebut mencatatkan lonjakan yang sangat signifikan, yakni tumbuh sebesar 54,01% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 2.2).

**Tabel 2.13. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**

Inflasi 15,78% (yoy)		Andil 0,92%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Emas Perhiasan	0,86	Parfum	0,01
Shampo	0,02	Pembalut Wanita	0,01
Sabun Mandi	0,02	Popok Bayi	0,01
Pasta Gigi	0,02	Sabun Mandi Cair	0,01
Bedak	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Grafik 2.2. Perkembangan Harga Emas Dunia**

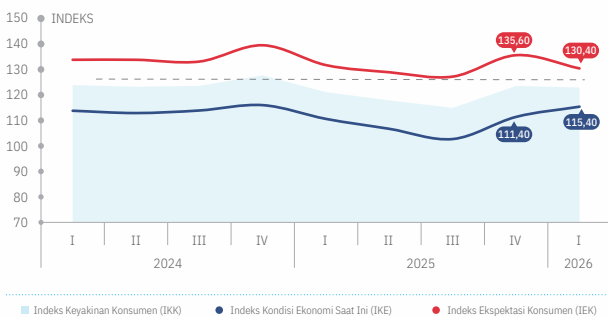


Sumber: Bloomberg, diolah

## Survei Konsumen

Terkendalnya laju inflasi bulanan pada triwulan I 2026 turut dibantu oleh terjaganya keyakinan dan ekspektasi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa indikator masih berada di zona optimis (di atas indeks 100). Secara spesifik, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masing-masing tercatat sebesar 122,90 dan 130,40. Meskipun kedua indikator tersebut mengalami sedikit

**Grafik 2.3. Perkembangan Survei Konsumen**



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, posisinya masih berada di zona optimis mencerminkan keyakinan masyarakat yang tetap kuat. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) justru mencatatkan peningkatan menjadi 115,40. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap perekonomian daerah saat ini semakin membaik dan lebih optimis dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 2.3).

## 2.3. Tracking Inflasi Triwulan II 2026 dan Inflasi 2026

### Inflasi Triwulan II 2026

Pada April 2026, Provinsi Aceh mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,23% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 3,88% (yoy). Peningkatan laju inflasi ini dipicu oleh terganggunya pasokan komoditas perikanan laut (seperti tongkol, bandeng, dan dencis) akibat anomali cuaca yang menghambat nelayan melaut. Di sisi lain, kapasitas angkut logistik belum pulih sepenuhnya pascabencana, khususnya pada jalur distribusi wilayah tengah dan timur seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Dari sisi eksternal, eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi global, yang secara langsung berdampak pada penyesuaian harga energi nonsubsidi domestik. Tercatat pada 18 April 2026, harga BBM nonsubsidi naik rata-rata 18%, disusul peningkatan harga solar nonsubsidi hingga 53%. Di sektor transportasi, kenaikan harga avtur mendorong penetapan *fuel surcharge* angkutan udara secara nasional sejak awal April 2026. Lebih lanjut, *spillover effect* dari gangguan pasokan energi global ini turut memberikan tekanan pada harga komoditas bahan bakar rumah tangga, yakni LPG nonsubsidi (5 kg dan 12 kg).

Memasuki bulan Mei 2026, tekanan inflasi Aceh meningkat menjadi 0,60% (mtm) atau 5,12% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh permintaan *seasonal* menyambut HBKN Iduladha 1447 H dan tradisi Meugang. Ketersediaan pasokan juga terbatas akibat anomali cuaca di awal bulan serta masuknya masa tanam untuk komoditas strategis, seperti cabai merah. Sementara itu, faktor geopolitik terus menahan rantai pasokan global, memicu fluktuasi harga CPO dunia serta meningkatkan biaya bahan baku plastik.

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 diperkirakan terus membaik mendekati rentang sasaran inflasi nasional (2,5%±1%). Perkiraan ini ditopang oleh berlanjutnya proses normalisasi harga pascabencana akhir 2025, seiring dengan berlanjutnya proses rekonstruksi jalur distribusi dan rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana. Selain itu, terdapat implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026, berupa insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tarif angkutan udara yang berlaku pada 25 April hingga 23 Juni 2026.

Kendati demikian, terdapat beberapa risiko yaitu fenomena price rigidity masih membayangi dan menciptakan level harga baru di tingkat konsumen. Risiko pendorong inflasi lainnya berasal dari masuknya masa tanam komoditas strategis (cabai merah).

## Inflasi Keseluruhan Tahun 2026

Proyeksi inflasi Provinsi Aceh untuk keseluruhan tahun 2026 diprakirakan akan terkendali dan berada di dalam rentang sasaran nasional, yakni  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy). Terjaganya stabilitas harga tersebut ditopang oleh berlanjutnya proses rekonstruksi dan rehabilitasi jalur distribusi dan fasilitas produksi, serta normalisasi harga pascabencana. Namun demikian, risiko *upside risks* tetap perlu diwaspadai, terutama dari fluktuasi harga komoditas global akibat belum meredanya gejolak geopolitik yang berpotensi memberikan efek rambatan terhadap peningkatan harga domestik.

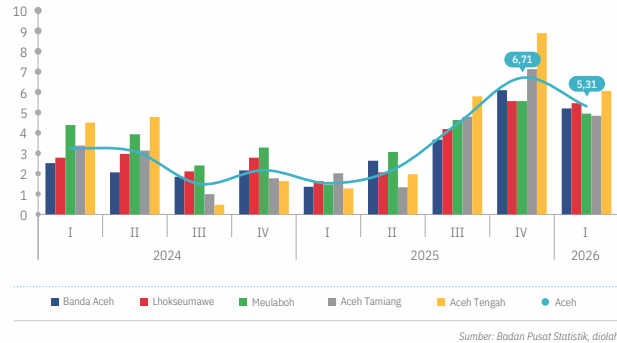
Untuk menjaga inflasi Aceh kembali berada dalam sarannya, perlu adanya penguatan kolaborasi dan sinergi di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh menjadi krusial. Strategi pengendalian perlu difokuskan secara spesifik pada komoditas pangan, yang memiliki sensitivitas dan fluktuasi harga tertinggi. Upaya stabilisasi ini dapat diwujudkan melalui implementasi kerangka strategi 4K, yakni menjamin Keterjangkauan Harga, memastikan Ketersediaan Pasokan, menjaga Kelancaran Distribusi, serta membangun Komunikasi Efektif guna mengelola ekspektasi pasar. Seluruh langkah strategis tersebut dapat diintegrasikan dengan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Provinsi Aceh.

## 2.4. Inflasi Spasial

### 2.4.1. Gambaran Umum

Pada triwulan I 2026, seluruh kabupaten/kota IHK di Provinsi Aceh mencatatkan inflasi secara tahunan, meskipun dalam laju yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara spasial, Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi yang mencapai 6,07% (yoy). Sebaliknya, inflasi terendah dicatatkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang dengan capaian sebesar 4,84% (yoy). Tingginya tekanan inflasi tahunan di Aceh Tengah mengindikasikan adanya rambatan lonjakan harga pascabencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Namun, jika dilihat secara bulanan, Kabupaten Aceh Tamiang justru mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,46% (mtm), sementara Kabupaten Aceh Tengah mencatatkan deflasi sebesar 0,56% (mtm). Deflasi bulanan yang terjadi di wilayah tersebut mengindikasikan bahwa saat ini tengah berlangsung proses pemulihan jalur distribusi, normalisasi harga dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Grafik 2.4. Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

### 2.4.2. Inflasi Kota Banda Aceh

Tekanan inflasi tahunan di Banda Aceh paling besar bersumber dari komoditas emas perhiasan yang mencatatkan andil tertinggi sebesar 1,45% (yoy). Kenaikan tingkat harga juga didorong oleh penyesuaian tarif listrik dengan kontribusi mencapai 0,94%. Selain itu, komoditas bahan makanan dan siap saji juga memberikan dorongan inflasi lanjutan, yang secara berturut-turut disumbang oleh nasi dengan lauk sebesar 0,41%, beras sebesar 0,40%, serta ikan tongkol dengan andil 0,26%.

Berlawanan dengan kondisi tersebut, laju inflasi di Kota Banda Aceh secara umum tertahan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas dan jasa. Baju muslim wanita menjadi komponen utama penahan inflasi dengan andil deflasi terdalam sebesar -0,15%, diikuti oleh tarif sekolah menengah atas yang menyumbang deflasi sebesar -0,11%. Selanjutnya, tekanan harga semakin ditahan oleh tarif sekolah menengah pertama dan komoditas kentang yang masing-masing mencatatkan andil deflasi sebesar -0,07%, serta bahan bakar rumah tangga dengan kontribusi deflasi sebesar -0,06%.

Tabel 2.14. Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% , yoy)

Banda Aceh			
	Andil Inflasi		Andil Deflasi
Emas Perhiasan	1,45	Baju Muslim Wanita	-0,15
Tarif Listrik	0,94	SMA	-0,11
Nasi Dengan Lauk	0,41	SMP	-0,07
Beras	0,40	Kentang	-0,07
Ikan Tongkol	0,26	Bahan Bakar RT	-0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

### 2.4.3. Inflasi Kota Lhokseumawe

Kontributor terbesar terhadap kenaikan harga di kota Lhokseumawe bersumber dari komoditas nasi dengan lauk dan penyesuaian tarif listrik, yang masing-masing memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,92%. Tekanan harga lebih lanjut disumbang oleh pergerakan nilai emas

perhiasan dengan andil mencapai 0,74%. Selain itu, komoditas pangan seperti beras dan ikan bandeng/ikan bolu turut memberikan dorongan lebih lanjut terhadap inflasi, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,57% dan 0,36%.

Sementara itu, laju inflasi secara agregat di Lhokseumawe berhasil diredam oleh tren penurunan harga yang berpusat pada kelompok bumbu-bumbuan dan sayuran. Komoditas cabai merah menjadi penahan inflasi paling signifikan dengan mencatatkan andil deflasi terdalam sebesar -0,15%. Penurunan tingkat harga juga tercatat pada komoditas kentang dan bawang merah, yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar -0,07%. Lebih lanjut, tekanan inflasi juga ditahan oleh pergerakan harga bawang putih dan wortel dengan kontribusi deflasi secara berurutan sebesar -0,05% dan -0,03%.

**Tabel 2.15. Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% , yoy)**

Lhokseumawe			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Nasi dengan Lauk	0,92	Cabai Merah	-0,15
Tarif Listrik	0,92	Kentang	-0,07
Emas Perhiasan	0,74	Bawang Merah	-0,07
Beras	0,57	Bawang Putih	-0,05
Ikan Bandeng/Bolu	0,36	Wortel	-0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

#### 2.4.4. Inflasi Kota Meulaboh

Perkembangan harga secara tahunan di Meulaboh menunjukkan peningkatan inflasi didorong oleh pergerakan nilai emas perhiasan yang memberikan sumbangan tertinggi sebesar 1,24%. Faktor pendorong lainnya berasal dari penyesuaian komponen tarif listrik dengan andil mencapai 1,15%. Lebih lanjut, tekanan inflasi di wilayah ini juga disebabkan oleh kelompok bahan makanan pokok, makanan siap saji, dan produk tembakau, yang terlihat dari kontribusi beras sebesar 0,36%, nasi dengan lauk sebesar 0,29%, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan andil 0,13%.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh tren penurunan harga pada beberapa komoditas pangan dan barang kebutuhan. Komoditas cabai merah menjadi faktor penahan utama dengan mencatatkan andil deflasi terdalam sebesar -0,16%. Penurunan tingkat harga juga tercatat pada popok bayi sekali pakai/diapers dan kentang, yang masing-masing menahan laju inflasi dengan andil deflasi sebesar -0,06%. Selain itu, komoditas pembalut wanita dan bawang putih juga menjadi komponen penahan inflasi di Meulaboh dengan kontribusi deflasi secara berurutan sebesar -0,05% dan -0,04%.

**Tabel 2.16. Andil Inflasi di Meulaboh (% , yoy)**

Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	1,24	Cabai	-0,16
Tarif Listrik	1,15	Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	-0,06
Beras	0,36	Kentang	-0,06
Nasi dengan Lauk	0,29	Pembalut Wanita	-0,05
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,13	Bawang Putih	-0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

#### 2.4.5. Inflasi Kabupaten Aceh Tengah

Inflasi tahunan di Kabupaten Aceh Tengah pada periode laporan didorong oleh tekanan harga dari kelompok bahan makanan pokok dan produk olahan tembakau. Komoditas beras menjadi penyumbang inflasi paling signifikan dengan andil mencapai 0,77%. Kenaikan tingkat harga berlanjut dengan dorongan dari komoditas Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang memberikan kontribusi sebesar 0,52%. Selain itu, kelompok makanan siap saji turut memberikan dorongan inflasi lanjutan, yang terlihat dari andil nasi dengan lauk sebesar 0,44% serta bakso siap santap sebesar 0,37%. Di samping komoditas tersebut, tarif listrik juga tercatat masuk dalam komponen penyumbang inflasi.

**Tabel 2.17. Andil Inflasi di Aceh Tengah (% , yoy)**

Aceh Tengah			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Beras	0,77	Tidak Dipublikasi	
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,52	Tidak Dipublikasi	
Nasi dengan Lauk	0,44	Tidak Dipublikasi	
Bakso Siap Santap	0,37	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

#### 2.4.6. Inflasi Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan rincian komoditasnya, pendorong utama inflasi tahunan di Kabupaten Aceh Tamiang didominasi oleh kelompok bahan makanan pokok. Hal ini terlihat dari komoditas beras yang mencatatkan andil inflasi paling signifikan hingga mencapai 1,92%. Peningkatan tingkat harga secara umum juga didorong oleh penyesuaian tarif listrik dengan andil sebesar 0,75%. Komponen penyumbang inflasi selanjutnya secara berurutan berasal dari Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan kontribusi 0,50%, nasi dengan lauk sebesar 0,29%, serta pergerakan nilai emas perhiasan yang memberikan andil 0,28%.

Di sisi lain, komoditas hasil tangkapan laut dan bumbu dapur mengalami tren penurunan harga yang meredam tekanan inflasi secara agregat. Ikan tongkol/ikan ambu-ambu tercatat memberikan andil deflasi terdalam sebesar -0,37%, diikuti oleh

penurunan harga cabai merah dengan andil deflasi -0,28%. Laju inflasi di Aceh Tamiang ini juga semakin ditahan oleh deflasi pada komoditas ikan biji nangka/ikan kuniran sebesar -0,20%, bawang putih sebesar -0,14%, dan ikan bandeng/ikan bolu dengan sumbangan deflasi sebesar -0,10%.

**Tabel 2.18. Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% , yoy)**

Aceh Tamiang*			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Beras	1,92	Ikan Tongkol/ambu-ambu	-0,37
Tarif Listrik	0,75	Cabai Merah	-0,28
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,50	Ikan biji Nangka/Kuniran	-0,20
Nasi dengan lauk	0,29	Bawang Putih	-0,14
Emas Perhiasan	028	Ikan Bandeng/Bolu	-0,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

## 2.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Upaya untuk memastikan tingkat inflasi Aceh tetap terkendali pada rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$  dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tekanan inflasi tersebut bersumber dari efek rambatan pascabencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025, permintaan seasonal konsumsi masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta dinamika geopolitik global yang terus tereskalasi. Lebih lanjut, anomali cuaca pada pertengahan tahun yang berisiko menghambat aktivitas produksi pertanian juga menjadi faktor risiko yang patut diwaspadai. Merespons berbagai tantangan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bersinergi dengan TPID Provinsi Aceh dalam mengeksekusi langkah-langkah mitigasi yang strategis, terukur, dan efektif. Adapun langkah-langkah yang telah dan akan terus diakselerasi di bawah kerangka strategi 4K adalah sebagai berikut:

### 1. Keterjangkauan Harga

- Melaksanakan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP, Pasar Murah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 23 kab/kota di Provinsi Aceh, dengan prioritas pada 5 kab/kota IHK, serta menggelar Pasar Murah Daging khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat tradisi Meugang dan HBKN-- (Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha).
- Melakukan sidak pasar secara berkala dalam memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan selama HBKN Ramadhan.
- Menyalurkan bantuan dan pelatihan (*capacity building*) kepada petani untuk meningkatkan produktivitas, khususnya di wilayah terdampak bencana.
- Memperkuat sinergi dengan BUMN dalam menjamin ketersediaan energi dan cadangan pangan pemerintah.

### 2. Ketersediaan Pasokan

- Melakukan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) antar daerah sentra dan non sentra, terutama untuk komoditas pangan strategis, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
- Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra melalui optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.
- Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis.
- Melakukan fasilitasi *contract farming* antara UMKM dan kelompok tani produsen pangan strategis.
- Melakukan koordinasi antar lembaga dalam rangka pemantauan pasokan dan pengendalian inflasi.

### 3. Kelancaran Distribusi

- Mendorong program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) atau Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang efektif dan terarah pada komoditas strategis penyebab inflasi, terutama pada komoditas pangan.
- Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.

### 4. Komunikasi Efektif

- Mengoptimalkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning system* inflasi.
- Menyelenggarakan *capacity building* kepada TPID se-Provinsi Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi dalam pengendalian inflasi.
- Melaksanakan high level meeting TPID Provinsi Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2026.
- Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan yang dihadiri TPID Provinsi Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Aceh.

03.

# Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan & UMKM





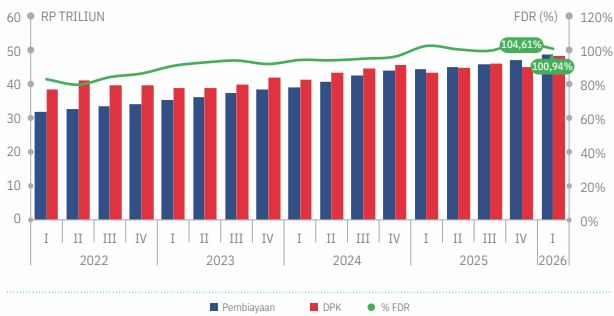
Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi.

Hal ini tercermin dari masih positifnya pertumbuhan pembiayaan dengan kualitas yang baik seiring masih rendahnya *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu, inklusivitas pembiayaan menunjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 25,33%. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mengalami ekspansi sebesar 11,48% (yoy).

### 3.1. Kondisi Umum

Kinerja intermediasi perbankan terpantau tetap terjaga pada triwulan I 2026, tercermin dari masih positifnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan pada triwulan I 2026 tercatat Rp48,75 triliun atau meningkat sebesar 9,59% (yoy) dibandingkan triwulan I 2025. Kemudian, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp48,30 triliun atau meningkat sebesar 11,48% (yoy). Dengan demikian, *Financing Deposit Ratio* (FDR) tercatat 100,94% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada triwulan yang sama pada 102,67% (Grafik 3.1). Penurunan FDR ini menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembiayaan secara tahunan.

**Grafik 3.1. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)**

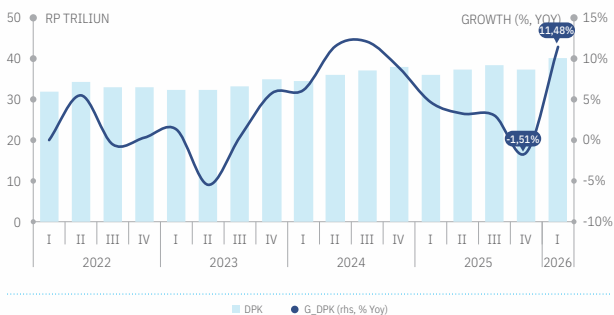


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Kinerja penghimpunan DPK terpantau mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2026, nominal DPK mencapai Rp48,30 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan nominal Rp43,33 triliun atau terekspansi sebesar 11,63% (yoy). Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada DPK korporasi, pemerintah, dan perseorangan yang masing-masing tumbuh sebesar 31,08%; 11,26%; dan 8,10% secara tahunan.

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan menunjukkan peningkatan secara triwulan. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan I

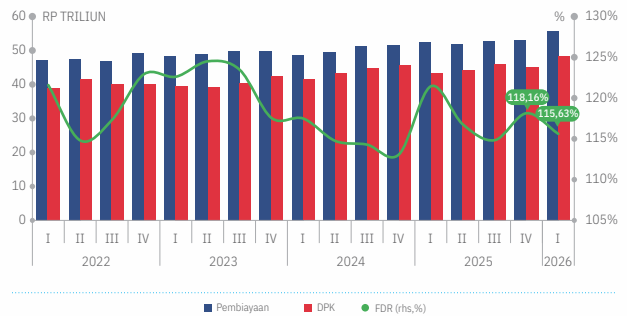
**Grafik 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

2026 sebesar Rp55,86 triliun meningkat sebesar 5,08% (qtq), serta meningkat sebesar 6,12% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan I pada tahun sebelumnya. Namun, FDR berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 115,63% lebih rendah dari triwulan sebelumnya 118,16% (Grafik 3.3).

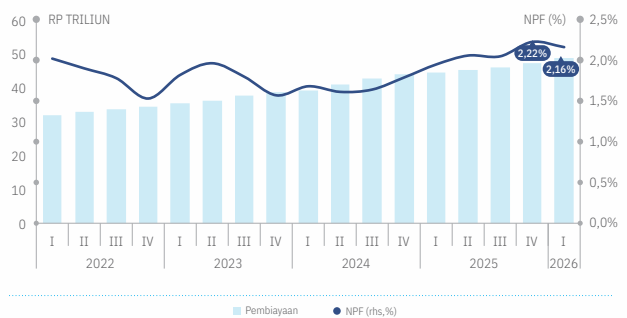
**Grafik 3.3. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan I 2026 menunjukkan kondisi yang terjaga. Secara agregat, risiko pembiayaan di Provinsi Aceh masih terjaga dalam batas aman yang tercermin dari *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 2,16%. Menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada 2,22% (Grafik 3.4), serta masih berada di bawah *threshold* 5%.

**Grafik 3.4. Perkembangan Non-Performing Financing (Berdasarkan Lokasi Bank)**



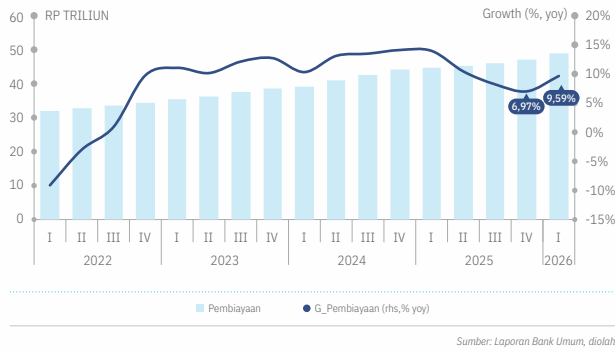
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan tumbuh secara triwulan. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi bank pada triwulan I 2026 sebesar Rp48,75 triliun meningkat sebesar 3,62% (qtq). Secara tahunan penyaluran pembiayaan turut tumbuh sebesar 9,59% (Grafik 3.5).

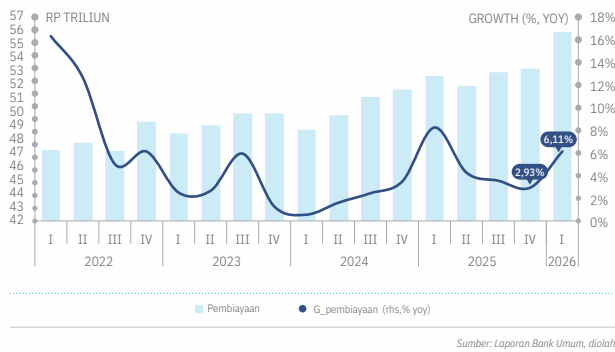
Selain itu, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh juga menunjukkan pertumbuhan. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp55,86 triliun, atau tumbuh sebesar 6,11% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat dari triwulan

sebelumnya sebesar Rp53,16 triliun. Selain itu, secara nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan nominal pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

**Grafik 3.5. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)**



**Grafik 3.6. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)**



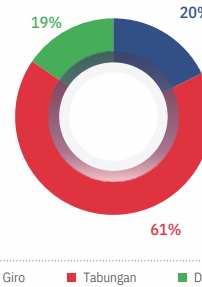
## 3.2. Intermediasi Perbankan

### 3.2.1. DPK Menurut Jenisnya

Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh. Pada triwulan I 2026, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 61%, diikuti giro sebesar 20% dan tabungan sebesar 19%. Secara nominal, total DPK pada triwulan I 2026 adalah sebesar Rp48,3 terdiri dari tabungan Rp29,52 triliun, giro sebesar Rp9,76 triliun, dan deposito Rp9,02 triliun.

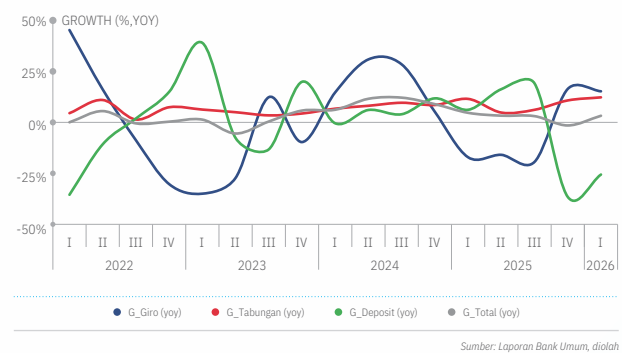
Pada triwulan laporan, jenis DPK yang mengalami pertumbuhan yaitu giro dan tabungan. Pada triwulan I 2026, giro dan tabungan merupakan jenis DPK yang mengalami pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar 48,71% (yoy) dan 15,15% (yoy). Sementara, deposito merupakan komponen DPK yang mengalami kontraksi sebesar -25,57% (yoy). Kendati demikian, penurunan tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 36,51%.

**Grafik 3.7. Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 3.8. Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis**

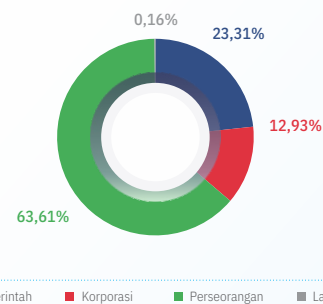


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

### 3.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 63,61%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi masing-masing memiliki porsi sebesar 23,31% dan 12,93%.

**Grafik 3.9. Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)**

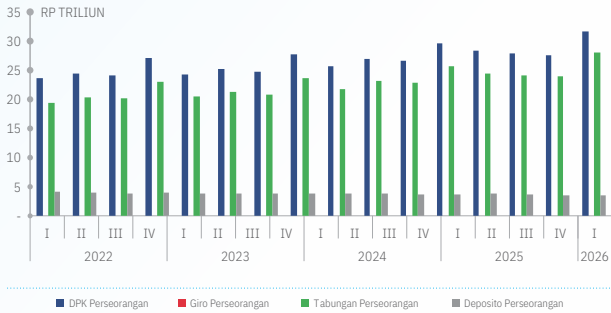


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari tabungan memiliki porsi sebesar 88,61%, deposito memiliki porsi sebesar 11,18%, dan giro memiliki porsi sebesar 0,36%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk giro dan

tabungan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 27,48% (yoy) dan 10,88% (yoy). Sementara itu deposito mengalami kontraksi sebesar -9,26% (yoy).

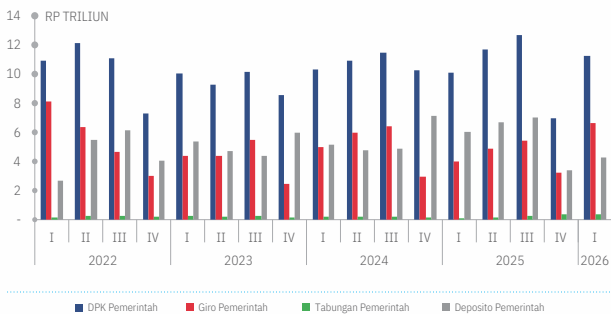
**Grafik 3.10. Perkembangan DPK Perseorangan**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

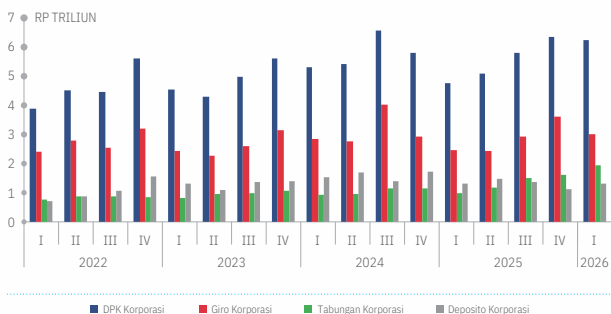
Pada triwulan laporan, DPK pemerintah tumbuh sebesar 11,26% (yoy). Ekspansi tersebut disebabkan oleh peningkatan tabungan pemerintah sebesar 236,53% (yoy). Kemudian, giro pemerintah mengalami turut tumbuh sebesar 66,13% (yoy). Di sisi lain, deposito pemerintah mengalami penurunan sebesar 29,02% (yoy).

**Grafik 3.11. Perkembangan DPK Pemerintah**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Grafik 3.12. Perkembangan DPK Korporasi**



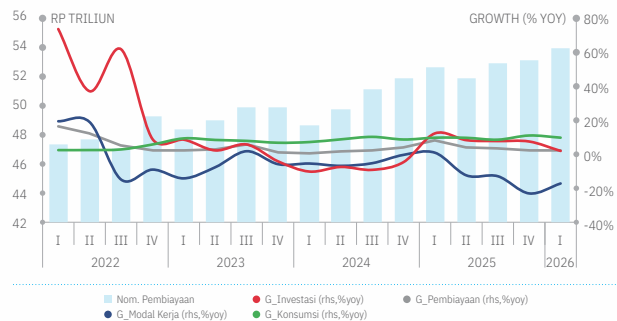
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK korporasi masih didominasi oleh giro. Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 47,98%, deposito sebesar 20,94%, dan tabungan sebesar 31,08%. DPK korporasi giro mengalami pertumbuhan sebesar 21,23% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang berada pada 23,15% (yoy). Selanjutnya, tabungan korporasi turut mengalami pertumbuhan sebesar 98,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 41,47% (yoy). Sedangkan DPK jenis deposito mengalami perlambatan sebesar -0,68% (yoy).

### 3.2.3. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan I 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 2,45% (yoy), yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu terus didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi dan investasi yaitu masing-masing sebesar 9,82% (yoy) dan 1,99% (yoy). Sedangkan pembiayaan modal kerja yang mengalami kontraksi sebesar 17,17%.

**Grafik 3.13. Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)**

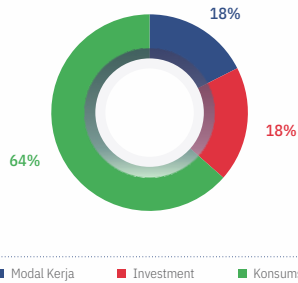


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 64%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 36%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 18% dan 18% dari total pembiayaan pada triwulan laporan.

Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan terjaganya optimisme konsumen. Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis hingga Maret 2026. Tercatat Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) senilai 111,24. Kemudian, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat nilai 103,90 pada triwulan I 2026.

**Grafik 3.14. Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan**

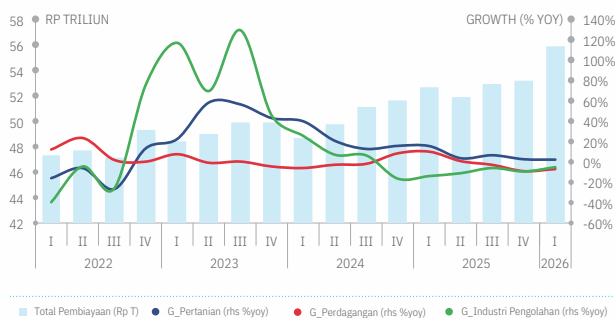


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

### 3.2.4. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

Pangsa pembiayaan terbesar menurut lapangan usaha didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan I 2026, porsi pembiayaan terhadap LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat 11,47%. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU ini mengalami kontraksi sebesar 7,05% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang turun lebih dalam sebesar -9,07% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 8,78% dan 6,29%. Pada triwulan I 2026. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,20% (yoy), namun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,58% (yoy). Sedangkan LU Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 5,17% (yoy) namun tidak sedalam pada triwulan sebelumnya yang sebesar 9,41% (yoy).

**Grafik 3.15. Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha**



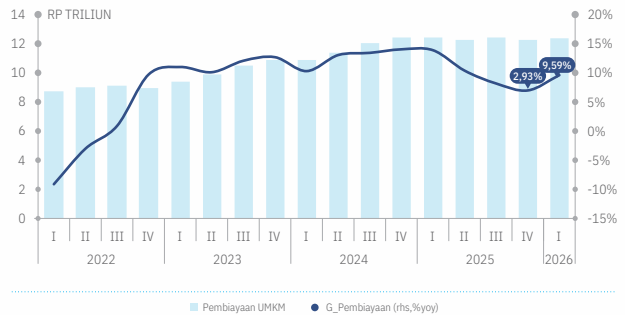
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

### 3.2.5. Pembiayaan UMKM

Kinerja pembiayaan UMKM pada triwulan I 2026 masih tumbuh melambat. Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat tumbuh sebesar 9,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,97% (yoy). Secara nominal, pembiayaan UMKM pada triwulan I 2026 mengalami penurunan yakni sebesar Rp12,34 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12,24 triliun. Sementara

itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan I 2026 sebesar 25,33%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

**Grafik 3.16. Perkembangan Pembiayaan UMKM**



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM.** Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan Loan to Funding Ratio sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

## 3.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

KPw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPw BI Provinsi Aceh dalam mendorong peningkatan akses keuangan bagi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pengembangan UMKM seperti pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). KPw BI Provinsi Aceh turut melakukan fasilitasi UMKM pada perluasan akses pasar maupun promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui program-program seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Industri Kreatif Syariah (IKRA).

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Program Pengembangan Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI).

Program yang diadakan tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Provinsi Aceh sehingga dapat naik kelas, terutama bagi wirausaha yang mendukung program pengendalian inflasi. Di samping itu, program WUBI ditujukan untuk mendorong ekspor atau substitusi impor, pariwisata, serta mendukung ekonomi dan keuangan syariah, dan mengembangkan produk dan jasa unggulan daerah. Lebih lanjut, melalui program WUBI dapat menciptakan ekosistem wirausaha di Provinsi Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh senantiasa melakukan sinergi dengan perbankan syariah di Aceh dalam mendorong pembiayaan. Pada Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2026, KPwBI Provinsi Aceh bersama perbankan melakukan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dengan total nilai sebesar Rp2,11 miliar. Adapun pada kegiatan tersebut turut diraih total penjualan UMKM senilai Rp2,9 miliar. Kemudian pada Meuseuraya Festival 2025, KPwBI Provinsi Aceh bersama Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah melakukan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dengan total nilai sebesar Rp1,45 miliar. Meuseuraya Festival dan Road to FESyar diadakan setiap tahun dengan komitmen dan semangat untuk meningkatkan pembiayaan bagi UMKM.



04.

# Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



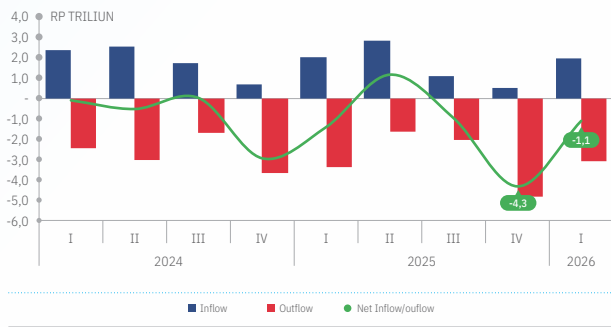


Pada triwulan I 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi net outflow pada triwulan laporan. Sementara, metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan APMK dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

### 4.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pengedaran uang kartal pada triwulan I 2026 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV 2025. Pada triwulan I 2026, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp1,1 triliun dengan komposisi total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp1,97 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp3,1 triliun (Grafik 4.1). *Net outflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa peredaran uang kartal di masyarakat masih lebih besar dibandingkan dengan setoran kembali ke Bank Indonesia. Kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh terhadap uang kartal pada triwulan I 2026 relatif tinggi.

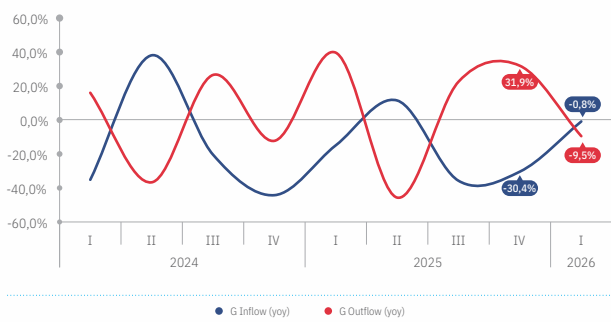
Grafik 4.1. *Netflow* Kas (Rp Triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Jika dilihat secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan I 2026 turun sebesar 9,5% (yoy) dan tingkat *inflow* terkontraksi sebesar 0,8% (yoy) (Grafik 4.2). Secara keseluruhan, peredaran uang kartal mengalami penurunan seiring dengan melambatnya konsumsi rumah tangga dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

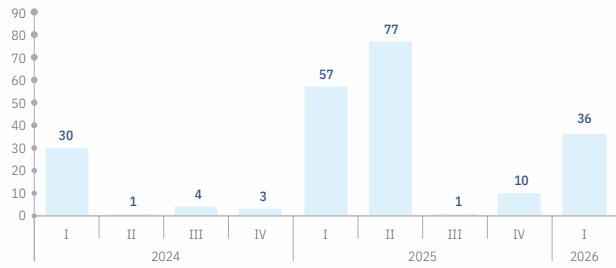
Grafik 4.2. Pertumbuhan *Inflow* dan *Outflow* (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya pada triwulan laporan mengalami kenaikan namun masih dalam batas yang aman. Kenaikan ini seiring meningkatnya peredaran uang pada periode menjelang HBKN Idul Fitri. Temuan tersebut berasal dari penukaran masyarakat dan penukaran perbankan (Grafik 4.3).

Grafik 4.3. Temuan Uang Palsu (Lembar)



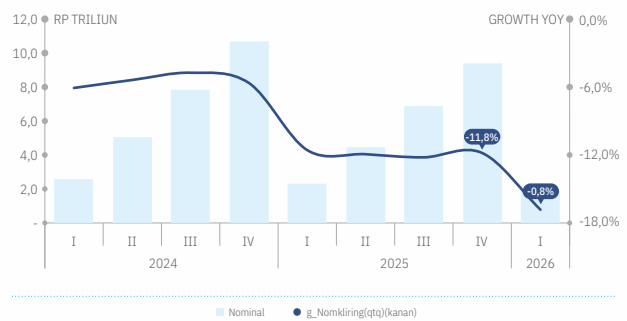
Sumber: Bank Indonesia, diolah

### 4.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Perkembangan pembayaran non tunai baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, terus menunjukkan tren positif. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi di provinsi Aceh, terdapat peningkatan preferensi masyarakat Aceh dalam melakukan transaksi secara non tunai. Hal ini tercermin dari masif nya pemanfaatan pembayaran non tunai menggunakan instrumen APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, instrumen Uang Elektronik (UE) baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Tren penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) juga bergerak positif diiringi dengan penurunan tren pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) ritel.

Nominal transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui SKNBI pada triwulan I 2026 terkontraksi 24,6% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan terkontraksi sebesar 16,8% (yoy) atau sebesar Rp1,9 triliun dari Rp2,3 triliun pada triwulan I 2025 (Grafik 4.4).

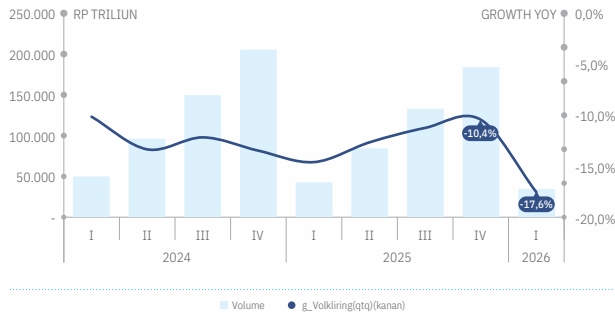
Grafik 4.4. Perkembangan Nominal SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan terkontraksi 31,8% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 35.012 transaksi atau terkontraksi sebesar 17,6% (yoy) dari 42.465 transaksi pada triwulan I 2025 (Grafik 4.5).

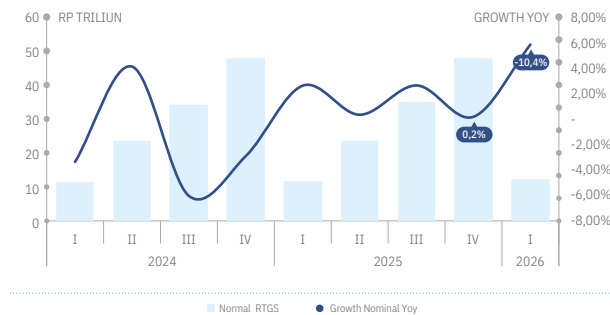
Grafik 4.5. Perkembangan Volume SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)* secara nominal tercatat mengalami penurunan pada triwulan laporan. Transaksi BI-RTGS pada triwulan I 2026 secara nominal tercatat sebesar Rp12,2 triliun atau naik sebesar 5,8% (yoy) dari Rp11,5 triliun pada triwulan I 2025. Secara triwulanan (qtq), nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan turun sebesar 5% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.6).

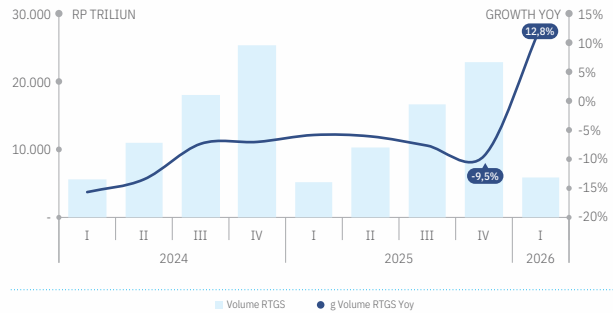
Grafik 4.6. Perkembangan Nominal BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Jika dilihat secara volume, transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan turut mengalami kontraksi sebesar 6% dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, volume transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 5.879 transaksi atau tumbuh sebesar 12,8% (yoy) dari 5.214 transaksi pada triwulan I 2025 (Grafik 4.7).

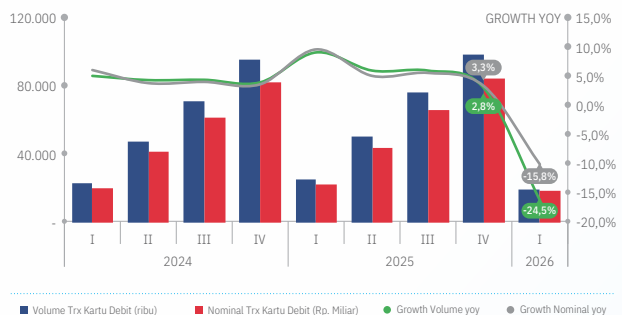
Grafik 4.7. Perkembangan Volume BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi menggunakan kartu ATM debit mengalami penurunan pada triwulan laporan. Secara tahunan, volume transaksi pada triwulan laporan tercatat menurun sebesar 24,5% (yoy) menjadi 19 juta transaksi dari 25 juta transaksi. Sementara nominal transaksi kartu ATM debit tercatat sebesar Rp18,7 Triliun atau turun sebesar 15,8% (yoy) (Grafik 4.8).

Grafik 4.8. Transaksi ATM Debit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi kartu kredit mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi naik sebesar 19,5% (yoy) atau menjadi sebesar 146 ribu transaksi (Grafik 4.9). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp138 miliar atau tumbuh sebesar 15,4% (yoy). Selama triwulan I 2026, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp129 miliar atau 94% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 141.484 transaksi atau 97% dari total volume transaksi.

Seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan I 2026 mencapai Rp1.093 miliar atau naik sebesar 16,4% (yoy).

Sementara volume transaksi UE naik sebesar 18,5% (yoy) atau sebanyak 8,8 juta transaksi selama triwulan I 2026 (Grafik 4.10). Tren transaksi UE yang terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*.

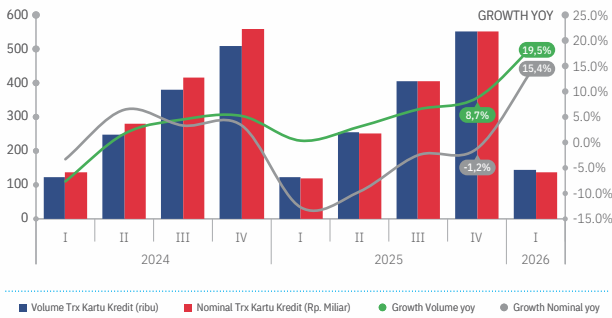
**Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE.** Meningkatnya minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce*. Selama triwulan I 2026, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp702 miliar atau 64% dari total nominal transaksi dengan volume sebanyak 7,3 juta transaksi atau 84% dari total volume transaksi.

**Implementasi QRIS menjadi pendorong meningkatnya transaksi UE berbasis server (*server based*) di Provinsi Aceh.** Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui QRIS mengalami peningkatan yang tercermin dari perkembangan volume dan nominal transaksinya. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang

semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

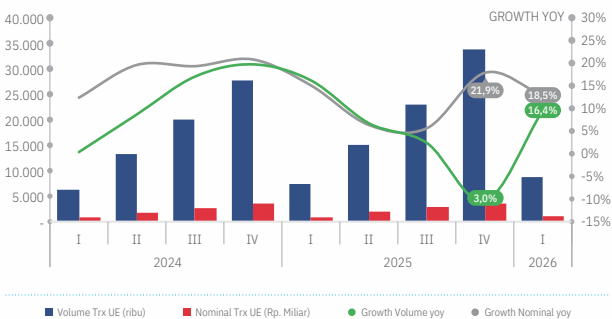
**Peningkatan transaksi QRIS didukung oleh terus meningkatnya jumlah *merchant*.** Hingga triwulan I 2026, terdapat 276.641 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.11). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 40,85% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 196.415 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 11,2% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 248.708 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 216.981 *merchant* (78,4%).

Grafik 4.9. Transaksi Kartu Kredit



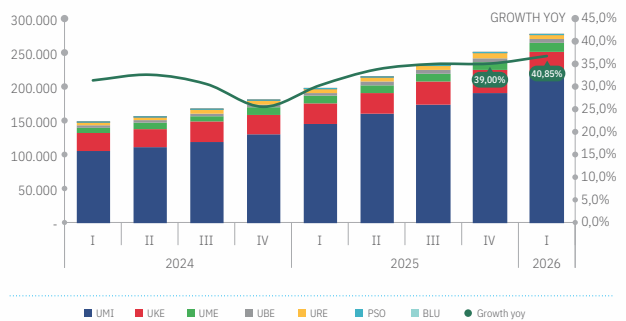
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10. Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

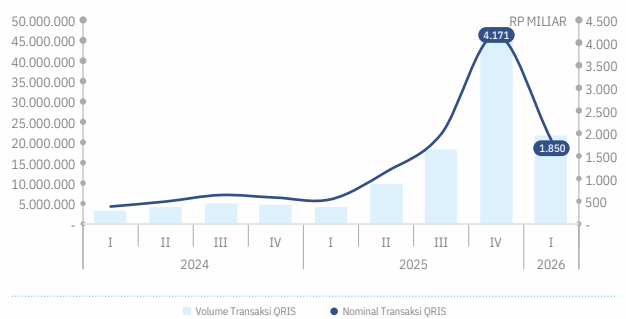
Grafik 4.11. Pertumbuhan Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan I 2026 telah terdapat 750.918 pengguna atau bertambah sebanyak 30.231 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan I 2026 terdapat 21,7 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp1.850 miliar (Grafik 5.12). Kota Banda Aceh dan Aceh Tamiang sebagai penyumbang kenaikan volume dan nominal QRIS.

Grafik 4.12. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

### 4.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

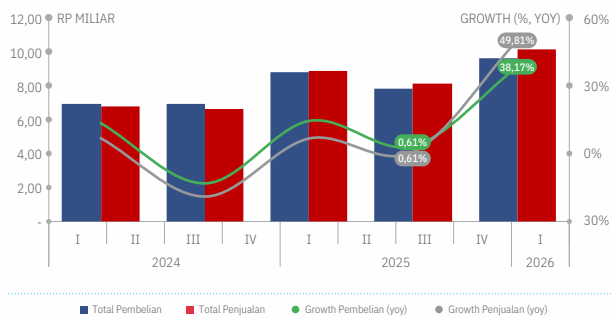
Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil, Bank Indonesia juga berperan sebagai regulator Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di daerah.

Hingga triwulan I 2026, terdapat 13 (tiga belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan I 2026, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 43,91% (yoy) menjadi Rp23,02 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp16,00 miliar.

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan menunjukkan adanya peningkatan. Pembelian UKA di Provinsi Aceh pada triwulan I 2026 masih tumbuh sebesar 38,17% (yoy) yaitu dari Rp8,10 miliar pada triwulan I 2025 menjadi Rp11,19 miliar. Sejalan dengan hal tersebut penjualan UKA pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 49,81% (yoy) dari Rp7,90 miliar pada triwulan I 2025 menjadi Rp11,83 miliar (Grafik 4.13).

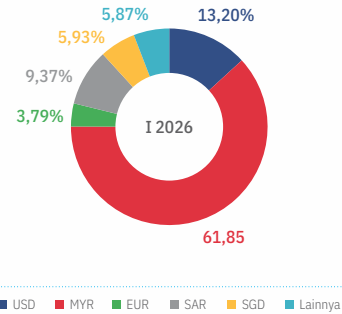
Grafik 4.13. Transaksi KUPVA BB



Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 61,85% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 13,20% (Grafik 4.14). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor geografis, pariwisata, pendidikan, ekspor impor, dan remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Grafik 4.14. Disagregasi Transaksi UKA



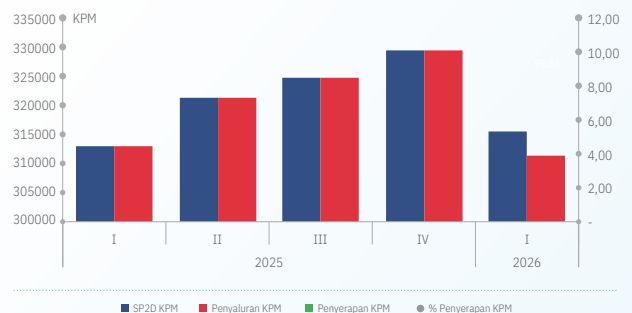
Sumber: LKPBU, diolah

### 4.4. Penyaluran PKH dan Program Sembako

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Sesuai instruksi Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyaluran secara tunai dilakukan oleh PT Pos Indonesia, sedangkan penyaluran secara non tunai dilakukan oleh Himbara - BSI. Jenis bantuan sosial yang disalurkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan *monitoring* dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

Grafik 4.15. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)

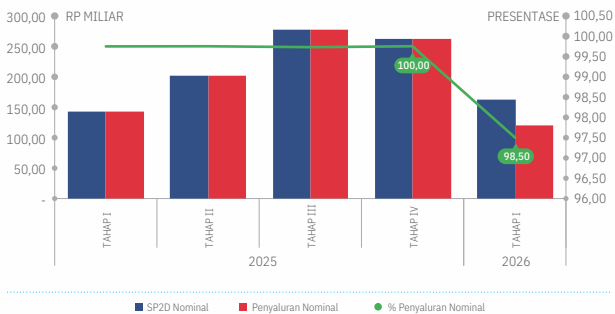


Sumber: Himbara, diolah

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap I tahun 2026 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 98,50% kepada KPM (Grafik 4.15). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap I tercatat sebanyak 311.246 atau telah mencapai 98,68% dari target jumlah penerima sebanyak 315.403 KPM. Kenaikan penyaluran pada triwulan laporan didukung oleh peningkatan efektivitas proses penyaluran oleh BSI dan kesiapan infrastruktur sistem pembayaran.

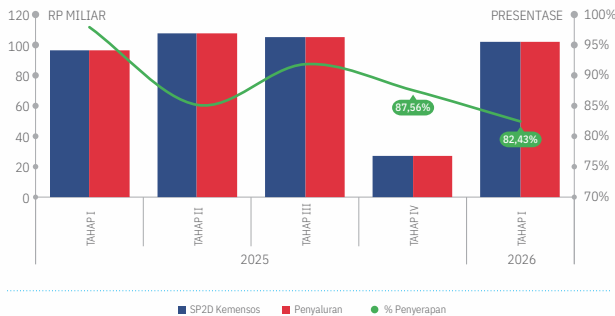
Dari aspek nominal, besaran bantuan yang disalurkan pada setiap tahap mengalami fluktuasi seiring dengan penyesuaian terhadap data KPM yang diperbarui secara berkala oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada Tahap I tahun 2026, nominal bantuan yang disalurkan mencapai sebesar Rp229,99 miliar dengan tingkat penyaluran PKH yang telah mencapai 98,50% (Grafik 4.16). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahap I tahun 2025, yaitu sebesar Rp231,90 miliar.

**Grafik 4.16. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)**



Sumber: Himbara, diolah

**Grafik 4.17. Perkembangan Program Sembako (Nominal)**



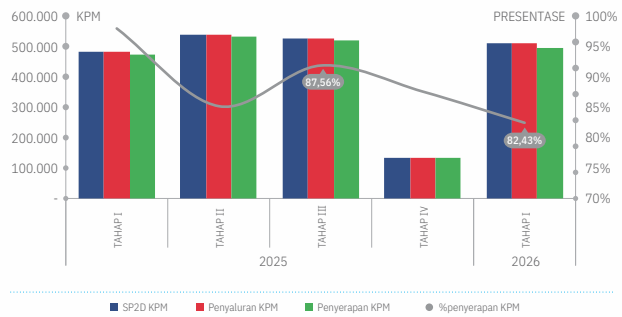
Sumber: Himbara, diolah

Pada Tahap I 2026, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp102 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 82,43% (Grafik 5.17). Jumlah tersebut naik dibandingkan Tahap I 2025 sebesar

Rp97 miliar. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme non tunai oleh Himbara-BSI di 72 Kab/Kota dan mekanisme tunai oleh PT Pos Indonesia di 22 Kab/Kota di Provinsi Aceh.

Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan naik menjadi 509 ribu KPM dari jumlah KPM Tahap I 2025 sebanyak 483 ribu KPM (Grafik 4.18). Kenaikan penyaluran didukung oleh peningkatan efektivitas proses penyaluran oleh Himbara-BSI dan PT Pos Indonesia serta penambahan Kab/Kota penerima program.

**Grafik 4.18. Perkembangan Program Sembako (KPM)**



Sumber: Himbara, diolah



05.

# Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan





Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan pada Februari 2026 sebagai dampak dari bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Meskipun demikian, kondisi ketenagakerjaan masih menunjukkan beberapa perbaikan dari sisi kualitas, seperti peningkatan proporsi pekerja formal serta penurunan tingkat setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dinamika ini mencerminkan bahwa meskipun tekanan di pasar tenaga kerja meningkat, aktivitas ekonomi tetap berjalan dan mampu menjaga sebagian daya serap tenaga kerja.

## 5.1. Ketenagakerjaan

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Aceh, tercatat mengalami peningkatan. Pada Februari 2026, tingkat TPT di Provinsi Aceh tercatat sebesar 5,88%, mengalami kenaikan sebesar 0,28% poin dibandingkan Februari 2025 sebesar 5,60%. Sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026 terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebanyak 48 ribu orang. Peningkatan tersebut terindikasi sebagai dampak bencana hidrometeorologi yang berdampak pada belum pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.

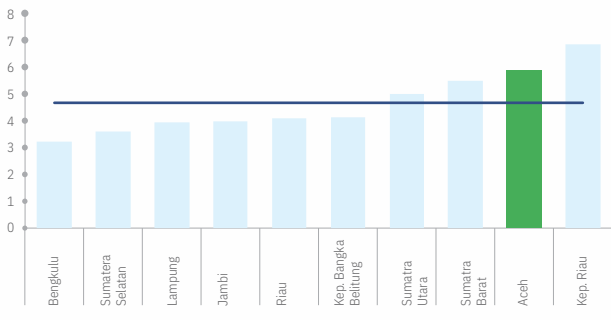
**Tabel 5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran %	
November 2025	5,60%
Februari 2026	5,88%

Sumber: BPS, diolah

Jika dilihat dari pangasanya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar pada Februari 2026 adalah Perdagangan Besar dan Eceran -0,82% diikuti oleh Pertambangan dan Pengalihan -0,60% dan Administrasi Pemerintahan -0,29% dibanding Februari 2025.

**Grafik. 5.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)**



Sumber: BPS, diolah

**Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh relatif lebih lambat dibandingkan beberapa provinsi lain di Sumatera.** Pada Februari 2026, TPT Aceh sebesar 5,88 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen, dan menempatkan Aceh sebagai peringkat ke-dua provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di wilayah Sumatera. Di sisi lapangan usaha, beberapa sektor utama seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Konstruksi mengalami penurunan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

**LU Pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar.** Pangsa penyerapan tenaga kerja pada LU ini mencapai 41,39%. Selanjutnya diikuti oleh sektor

**Tabel 5.2. Perkembangan TPT**

Pengangguran	2025	2026
	NOV	FEB
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.565	2.500
Pengangguran	152	156
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	65,13	65,44
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	5,60	5,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Tabel 5.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor**

Sektor	Februari 2026 (%)
Pertanian	41,39
Perdagangan	13,41
Administrasi Pemerintahan	6,97
Industri Pengolahan	6,72
Konstruksi	5,63
Pendidikan	5,57
Akomodasi dan Makan Minum	5,43
Aktivitas Jasa Lainnya	3,87

Sumber: BPS, diolah

Perdagangan (13,41%), Pendidikan (6,87%), Industri Pengolahan (6,72%), Administrasi Pemerintahan (5,63%), Akomodasi dan Makan Minum (5,57%), Konstruksi (5,43%) dan Jasa Lainnya (3,87%).

**Tenaga kerja di Provinsi Aceh pada Februari 2026 masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas.** Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2026, penduduk bekerja didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 36,70%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SD ke bawah sebesar 23,47%, Sekolah Menengah Pertama sebesar 18,29%, Diploma IV/S1/S2/S3 sebesar 13,29%, Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 4,24%, dan Diploma I/II/III sebesar 4,02%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang relatif sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan dominasi tenaga kerja berpendidikan menengah.

Status pekerja di Aceh pada November 2025 mayoritas adalah Buruh/Karyawan/Pegawai. Status pekerjaan penduduk Provinsi Aceh didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 31,44%. Sementara itu, porsi terkecil adalah pekerja berstatus pekerja bebas di nonpertanian sebanyak 4,41%.

**Tabel 5.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)**

Pendidikan Tertinggi	2025	2026
	NOV	FEB
Sekolah Menengah Atas	33,94%	36,70%
Sekolah Dasar ke Bawah	22,29%	23,47%
Sekolah Menengah Pertama	19,76%	18,29%
Diploma IV/S1/S2/S3	15,26%	13,29%
Sekolah Menengah Kejuruan	5,26%	4,24%
Diploma I/II/III	3,49%	4,02%

Sumber: BPS, diolah

Sementara jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja informal mengalami penurunan. Pada Februari 2026, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 35,85%, sedangkan kegiatan informal sebanyak 64,15%. Dibandingkan Februari 2025, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan 0,16%. Di sisi lain, penduduk dengan pekerjaan informal mengalami penurunan sebesar 0,16%. Walaupun terjadi penurunan, namun proporsi pekerja informal masih mendominasi. Hal ini patut menjadi perhatian karena pekerja informal cenderung berpendapatan tidak tetap sehingga memiliki kerentanan lebih tinggi.

**Tabel 5.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan**

Status Pekerjaan	Porsi (%)	
	NOV 2025	FEB 2026
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,81%	31,44%
Berusaha Sendiri	18,51%	18,44%
Berusaha Dibantu Pekerja Tidak Tetap	14,98%	19,18%
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	13,53%	13,42%
Pekerja Bebas di Non Pertanian	8,60%	5,17%
Pekerja Bebas di Pertanian	8,18%	7,95%
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4,39%	4,41%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani<sup>4</sup> (NTP) Provinsi Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, NTP tercatat sebesar 124,10, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 124,36. NTP di atas 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Pada Triwulan I 2026, penurunan NTP terjadi di subsektor Hortikultura (NTPH) sebesar 7,30%, dan Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 1,74%. Sedangkan, peningkatan NTP terjadi di subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 0,86%, Perikanan (NTPN) sebesar -0,22% dan subsektor Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 0,10%.

4. Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

**Tabel 5.6. Nilai Tukar Petani**

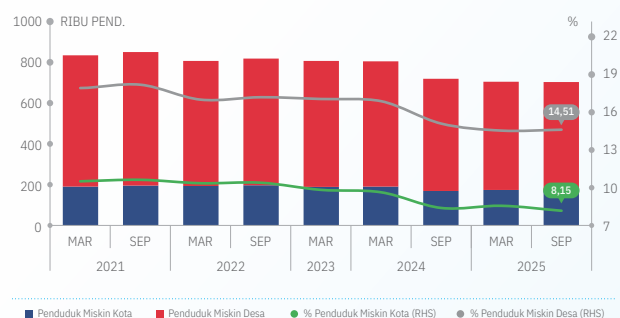
Nilai Tukar Petani (NTP)	
Triwulan IV 2025	124,36
Triwulan I 2026	124,10

Sumber: BPS, diolah

## 5.2. Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Provinsi Aceh terus mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data terkini, persentase kemiskinan di Provinsi Aceh pada September 2025 tercatat sebesar 12,22%, menurun 0,11% dibandingkan Maret 2025 sebesar 12,33%. Penurunan angka kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh beberapa indikator yang cenderung membaik yaitu pertumbuhan ekonomi, terjaganya inflasi, dan berlanjutnya program bantuan sosial.

Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan kemiskinan di perkotaan. Jika dibandingkan antara periode Maret 2025 dengan September 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dari 8,54% menjadi 8,15%. Di sisi lain dengan perbandingan periode yang sama, persentase penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 14,44% menjadi 14,51%. Pada posisi September 2025 jumlah penduduk miskin tercatat 703,33 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar 704,69 ribu jiwa. Jika dilihat lebih rinci, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan menurun sebesar 0,49% dari sebelumnya 174,18 ribu jiwa pada Maret 2025 menjadi 168,71 ribu jiwa pada September 2025. Pada periode yang sama, terjadi kenaikan penduduk miskin di perdesaan sebesar 0,07% dari sebelumnya 530,51 ribu jiwa pada Maret 2025 menjadi 534,56 ribu jiwa pada September 2025.

**Grafik 5.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota**

\*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Sumber: BPS, diolah

Data tingkat kemiskinan pada September 2025 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Angka kemiskinan Aceh yang sebesar

12,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera yang sebesar 8,25% serta Nasional 8,07%.

Grafik 5.3. Penduduk Miskin di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Tingkat kemiskinan yang menurun mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masyarakat masih mampu mengimbangi kenaikan Garis Kemiskinan. Berdasarkan hasil survei BPS di Provinsi Aceh, garis kemiskinan pada September 2025 dibandingkan dengan Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,75%, sehingga pendapatan per kapita perbulan yang semula Rp676.247,- menjadi Rp715.103,- per kapita per bulan.

Komoditas makanan masih menjadi komponen terbesar pembentuk garis kemiskinan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah komoditas makanan dengan sumbangan sebesar 75,32% di perkotaan dan 77,36% di pedesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan tongkol/tuna/ cakalang. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 24,68% di perkotaan dan

Tabel 5.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

Kemiskinan	
Kemiskinan (%)	
Maret 2025	12,33
September 2025	12,22
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	
Maret 2025	1.836
September 2025	2.055
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
Maret 2025	0,420
September 2025	0,523

Sumber: Data BPS, diolah

22,64% di pedesaan dengan komoditas yang menyumbang besar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode September 2025 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. P1 mengalami kenaikan dari 1,836 pada Maret 2025 menjadi 2,055 pada September 2025. Begitu pula dengan P2 yang mengalami kenaikan setelah sebelumnya 0,420 pada Maret 2025 menjadi 0,523 pada September 2025. Naiknya nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa intensitas dan tingkat keparahan kemiskinan meningkat, sehingga tekanan ekonomi pada kelompok miskin menjadi lebih dalam, meskipun secara persentase jumlah penduduk miskin bisa saja menurun.

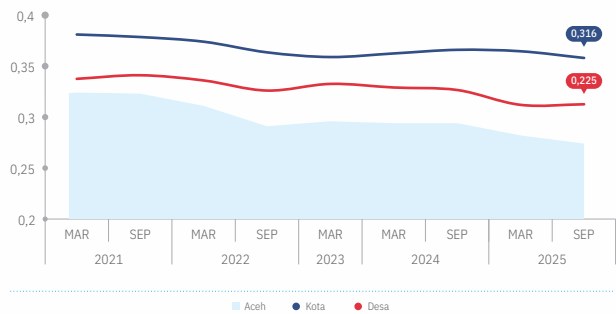
Tabel 5.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	Maret 2025		September 2025	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,187	0,258	1,216	0,244
Pedesaan	2,197	0,510	2,527	0,679
Gabungan	1,836	0,420	2,055	0,523

Sumber: Data BPS, diolah

Ketimpangan di perkotaan dan pedesaan mengalami perbaikan. Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini<sup>5</sup>. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada September 2025 sebesar 0,316, sedangkan pada pedesaan sebesar 0,225. Terjadi penurunan rasio baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan pada periode September 2025 dibandingkan Maret 2025. Rasio Gini di Provinsi Aceh secara keseluruhan menunjukkan tren yang menurun di 0,274 pada September 2025, dibandingkan dengan Maret 2025 di 0,282. Sedangkan jika dibandingkan secara *year-on-year* pada September 2024, terjadi penurunan dari 0,294 menjadi 0,274 di September 2025.

Grafik 5.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



\*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Sumber: BPS, diolah

5. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



06.

# Prospek Perekonomian Daerah





Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diperkirakan tumbuh terakselerasi pada kisaran 4,16%-5,16% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%. Terakselerasinya pertumbuhan perekonomian Aceh di tahun 2026, seiring dengan mulai efektifnya pembangunan dan rekonstruksi daerah pascabencana, serta normalisasi aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, laju inflasi Provinsi Aceh di tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5\pm 1\%$  (yoy) yang didukung pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

## 6.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2025. Berdasarkan *“World Economic Outlook – Global Economy in the Shadow of War”* oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan April 2026, perekonomian global tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,1% (yoy), melambat dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 3,4% (yoy). Angka proyeksi tersebut relatif tidak berubah dibandingkan proyeksi pada *“World Economic Outlook”* Edisi Oktober 2025, namun mengalami revisi ke bawah sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan proyeksi pada *“World Economic Outlook Update”* Edisi Januari 2026 (Tabel 6.1). Perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 utamanya dipengaruhi oleh dampak konflik global terhadap harga energi dan pangan, di tengah masih berlanjutnya sejumlah faktor penopang seperti penurunan tarif, dukungan kebijakan yang telah berjalan, serta limpahan dari kinerja akhir tahun 2025 dan triwulan I 2026 yang lebih baik dari ekspektasi di beberapa negara.

**Tabel 6.1. Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2026 (%yoy)**

Wilayah	Okt 2025	Jan 2026
<i>World Output</i>	3,1	3,3
<i>Advance Economies</i>	1,6	1,8
United States	2,1	2,4
Euro Area	1,2	1,3
Japan	0,6	0,7
United Kingdom	1,3	1,3
<i>Emerging Market</i>	4,0	4,2
China	4,2	4,5
India	6,2	6,4

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat di tahun 2026 tercatat sebesar 2,3% (yoy), mengalami revisi ke atas sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan proyeksi pada *“World Economic Outlook”* Edisi Oktober 2025. Sementara itu, dibandingkan proyeksi pada Edisi Januari 2026, angka proyeksi tersebut mengalami sedikit revisi ke bawah sebesar 0,1% (yoy). Revisi ke atas dibandingkan proyeksi Oktober 2025 turut dipengaruhi oleh faktor-faktor penopang pertumbuhan di Amerika Serikat, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif dan konflik global.

Revisi atas angka proyeksi juga terjadi pada negara-negara maju lainnya seperti negara anggota Uni Eropa dan Inggris. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, terdapat revisi ke bawah menjadi 1,1% (yoy) pada proyeksi April 2026, atau turun sebesar 0,1% (yoy) dibandingkan proyeksi Oktober 2025 dan turun sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan proyeksi Januari 2026.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris pada tahun 2026 direvisi ke bawah menjadi 0,8% (yoy), atau turun sebesar 0,5% (yoy) baik dibandingkan proyeksi Oktober 2025 maupun proyeksi Januari 2026. Revisi ke bawah pada kelompok negara maju tersebut sejalan dengan dampak konflik global terhadap harga energi serta pengetatan kondisi keuangan global.

Laju pertumbuhan negara berkembang seperti Cina dan India juga mengalami revisi ke atas dibandingkan proyeksi Oktober 2025 oleh IMF. Laju pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 4,4% (yoy), atau direvisi ke atas sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan proyeksi Oktober 2025. Di sisi lain, laju pertumbuhan India pada tahun 2026 diperkirakan berada pada angka 6,5% (yoy), atau lebih tinggi sebesar 0,3% (yoy) dibandingkan proyeksi Oktober 2025, dan tetap menjadi salah satu proyeksi pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara utama dunia. Tetap tingginya proyeksi pertumbuhan India sejalan dengan masih kuatnya kinerja perekonomian domestiknya.

Pada proyeksi inflasi dunia, rata-rata inflasi tahunan global (*World Consumer Prices*) pada tahun 2026 diperkirakan berada pada angka 4,4% (yoy), dan diperkirakan berangsur turun menjadi 3,7% (yoy) pada tahun 2027. Tren penurunan inflasi global ke depan tersebut sejalan dengan prakiraan moderasi harga komoditas pascagangguan akibat konflik global. Kendati demikian, terdapat potensi revisi ke atas pada inflasi global, seiring dengan perkembangan konflik global yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan pangan dunia.

**Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat.** Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Inflasi nasional pada tahun 2025 juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Angka tersebut dapat dicapai dengan dukungan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Walaupun demikian, secara umum terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2026, baik dari sisi global maupun sisi domestik.

Dari sisi tantangan global, perekonomian Indonesia diperkirakan akan masih menghadapi berbagai tantangan di antara lainnya yaitu: I. Meningkatnya potensi konflik geo-politik, khususnya di timur tengah yang mendorong harga energi global; II. Tingginya utang publik dunia, baik di negara maju maupun *Emerging Markets*; III. Meningkatnya volatilitas pasar uang global, khususnya risiko dari lembaga keuangan non-bank (*Non-Bank Financial Institutions*).

Dari sisi tantangan domestik, perekonomian Indonesia diperkirakan akan dihadapi tantangan seperti tren pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke informal. Selain dari itu dampak berkelanjutan dari kebijakan realokasi anggaran juga diperkirakan berdampak pada sektor konstruksi dan sektor penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman.

**Perekonomian Aceh pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh terbatas pada kisaran 4,16% - 5,16% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%.** Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan akan ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi pemerintah seiring dengan *base effect* terkontraksinya kinerja konsumsi pemerintah di tahun 2025 akibat kebijakan realokasi dan efisiensi anggaran, serta peningkatan realisasi belanja khususnya belanja pemerintah pusat di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja investasi juga diperkirakan meningkat seiring dengan proses pemulihan dan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terdampak bencana. Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap resilien. Hal ini turut didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi sesuai pada target nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).

Kinerja ekspor di tahun 2026 diperkirakan masih terbatas, seiring dengan termoderasinya permintaan impor batu bara India akibat *shifting* permintaan ke batu bara Russia dengan kalori lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat *oversupply* batu bara dunia secara umum yang turut menurunkan harga batu bara dunia. Di sisi lain, ekspor kopi dan CPO juga diperkirakan masih terhambat akibat terendahnya perkebunan khususnya di Kab. Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia pada bulan *Commodity Markets Outlook* bulan April 2026, harga acuan batubara (berdasarkan *Australian Benchmark Coal Price*) diperkirakan akan meningkat hingga 19,9% (yoy) pada akhir 2026, seiring dengan peningkatan harga energi dunia akibat konflik di timur tengah. Harga kopi arabika juga diperkirakan akan berangsur turun dari harga US\$8.47/Kg di tahun 2025 ke harga US\$7.25/Kg di tahun 2026 dan ke harga US\$7.00/Kg di tahun 2027, sejalan dengan tren penurunan harga yang terjadi sejak pertengahan tahun 2025. Turunnya harga kopi arabika dapat dikaitkan dengan, peningkatan kapasitas produksi di Brazil, serta perbaikan kondisi cuaca di Amerika Tengah dan Selatan. Kendati demikian, harga komoditas minyak sawit (CPO), diperkirakan meningkat dari US\$1.007/Mt di tahun 2025, menjadi US\$1.089/Mt di tahun 2026, dan terus meningkat ke US\$1.096/Mt di tahun 2027.

Sementara itu, dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan masih ditopang oleh kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) strategis seperti LU Konstruksi, LU Pengolahan, dan LU Perdagangan seiring dengan percepatan

progres rekonstruksi jalur distribusi dan rehabilitasi daerah terdampak bencana.

Secara umum, kinerja LU Konstruksi secara keseluruhan di tahun 2026 diperkirakan terakselerasi seiring dengan adanya penambahan TKDD sebesar Rp1,63 T dan peningkatan belanja APBN di daerah untuk percepatan proses rekonstruksi daerah yang terdampak bencana. Sejalan dengan LU Konstruksi, LU Perdagangan diperkirakan meningkat seiring dengan mulai pulih kembalinya seluruh jalur distribusi di Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja LU LU Pengolahan diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor CPO Aceh, serta normalisasi kapasitas produksi industri kimia di KEK Arun pascabencana hidrometeorologi.

## 6.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2026 yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF), proyeksi inflasi global diperkirakan akan menyentuh level 4,4% (yoy) pada tahun 2026, lebih tinggi jika dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Risiko utama pendorong inflasi ini beraal dari eskalasi ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah yang semakin memperburuk ketidakstabilan ekonomi global. Besaran dampak guncangan terhadap perekonomian dunia akan sangat bergantung pada durasi dan skala konflik, serta waktu pemulihan yang dibutuhkan agar kapasitas produksi dapat kembali normal. Transmisi dari guncangan tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas yang memicu *negative supply shock*. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi pada barang dan jasa yang padat energi, seperti pupuk, bahan kimia, makanan, hingga biaya transportasi. Rangkaian efek rambatan tersebut akan menghambat rantai pasokan global, memicu lonjakan inflasi, serta menggerus daya beli masyarakat. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global, laju inflasi dari sisi domestik diperkirakan akan tetap terkendali dan bergerak di dalam rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy). Terjaganya stabilitas harga nasional maupun daerah ini ditopang oleh efektivitas program-program stabilisasi harga, salah satunya melalui optimalisasi GPIPS.

**Laju inflasi Provinsi Aceh sepanjang tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dan berada di dalam rentang sasaran nasional  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy).** Dari kelompok bergejolak, tingkat inflasi diperkirakan menurun sejalan dengan pemulihan jalur distribusi logistik, yang turut diakselerasi oleh beroperasinya Tol Sigli-Banda Aceh pada tahun ini, serta perbaikan infrastruktur pertanian dan pertambakan pascabencana. Lebih lanjut, program rehabilitasi lahan, penyaluran bantuan benih unggul, dan pupuk diharapkan mampu memulihkan kapasitas sentra

produksi untuk mendorong kemandirian pangan, dengan fokus utama pada pemberdayaan petani sebagai produsen. Terjadinya *high base effect* pada akhir tahun 2025 juga mendorong kelompok ini untuk mencatatkan deflasi pada penghujung tahun laporan. Walaupun proyeksi pasokan diperkirakan membaik, masih ada upside risks akibat adanya fenomena price rigidity pada komoditas pangan pokok. Fenomena sulitnya harga untuk turun ini terus memberikan *second-round effect* terhadap tingginya harga komoditas turunan, seperti nasi dengan lauk. Pada kelompok harga yang diatur pemerintah, tekanan inflasi diproyeksikan meningkat akibat dampak transmisi dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia dan komoditas turunannya. Kondisi ini dapat memicu *second-round effect* akibat membengkaknya ongkos logistik dan biaya distribusi. Meskipun demikian, laju inflasi pada kelompok ini diperkirakan tidak akan meningkat lebih jauh, seiring dengan adanya faktor penahan dari kebijakan Pemerintah Pusat yang memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2026. Sementara itu, pada kelompok inti, tekanan inflasi diproyeksikan masih akan berlanjut. Eskalasi konflik geopolitik yang berkepanjangan terus memicu volatilitas harga pada komoditas emas perhiasan hingga nilai tukar dolar AS. Di samping itu, tekanan kelompok inti juga didorong oleh fenomena *price rigidity* pada komoditas makanan siap saji, khususnya nasi dengan lauk. Hal ini terlihat dari kenaikan harga komoditas tersebut yang terus berlanjut pascabencana.

TPID Aceh terus mengakselerasi berbagai langkah mitigasi dalam mengendalikan inflasi melalui sejumlah program strategis, salah satunya adalah GPIPS. Inisiatif ini diimplementasikan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat fundamental ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut dipadukan dengan kerangka strategi 4K, yang meliputi penjaminan Ketersediaan Pasokan, pemastian Keterjangkauan Harga, optimalisasi Kelancaran Distribusi, serta penguatan Komunikasi Efektif, khususnya yang berfokus pada sinergi antar lembaga. Melalui kebijakan tersebut, volatilitas harga di tingkat konsumen diharapkan dapat diredam, sehingga laju inflasi daerah tetap terjaga stabil di dalam rentang sasaran nasional sebesar  $2,5\% \pm 1\%$ .

### 6.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

#### Pertumbuhan Ekonomi

1. **Restore Faster, Build Back Better: Mempercepat progres rekonstruksi jalur distribusi utama melalui prioritas koridor dan peningkatan kualitas infrastruktur.** Hal ini

dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan pada sejumlah titik strategis yang menjadi tumpuan logistik antar kabupaten dan antar provinsi, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum pada titik yang berpotensi mengalami kerusakan berulang. Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan penetapan target pencapaian lintas perangkat daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Dinas PUPR Provinsi, Balai Wilayah Sungai) untuk: (i) Menetapkan sejumlah koridor distribusi prioritas (akan dijadikan prioritas utama rekonstruksi), (ii) Menetapkan kontrak kerja berdasarkan *output* dan tenggat waktu, (iii) Menerapkan standar teknis konstruksi adaptis (drainase, proteksi lereng, elevasi badan jalan, desain jembatan tahan arus, dll.) agar risiko *shock* berulang tidak terjadi.

2. **Faster Recovery, Higher Harvest: Mempercepat rehabilitasi lahan pertanian untuk mendorong sektor pertanian dan mengendalikan inflasi.** Kebijakan diarahkan pada dua klaster: (a) pemulihan produksi melalui rehabilitasi irigasi/alsintan, bantuan benih cepat tanam, pemulihan lahan pascabanjir, serta *restocking* perikanan/ternak; (b) manajemen pasokan melalui penguatan operasi TPID berbasis data stok dan distribusi antardaerah untuk menjaga stabilitas harga. Relevansinya meningkat mengingat inflasi tahunan Aceh masih tinggi pada Januari 2026.
3. **Public-Private Partnership: Menjadikan proyek rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum sebagai salah satu jalan (Pipeline) untuk meningkatkan kinerja investasi.** Pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, dapat dijadikan kesempatan dan momen untuk menyajikan sebagian dari proyek rekonstruksi untuk turut dibangun dan didukung oleh pihak swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan Proyek Siap Eksekusi (desain matang, kepastian lahan, skema pendanaan jelas: APBD/DAK/KPBU/dll.) yang berfokus pada rekonstruksi untuk dipresentasikan ke calon investor.
4. **Risk-Adjusted Export Strategy: Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan ekspor komoditas non-tambang.** Struktur ekspor Aceh masih sangat bergantung pada komoditas batu bara, dengan pangsa sebesar 71,07% dari total ekspor. Selain dari itu, ekspor komoditas hanya terkonsentrasi pada satu pasar, yaitu pasar India dengan pangsa 90,17% dari total ekspor batu bara. Hal ini menyebabkan kinerja ekspor Aceh sangat rentan terhadap pergerakan harga batu bara global dan produktivitas lahan pertambangan. Pelemahan permintaan di India juga akan langsung menekan kinerja ekspor Aceh secara keseluruhan. Kebijakan ekspor di tahun 2026, perlu menggeser strategi dari “Volume Driven”

khususnya pada sektor tambang, menjadi *Risk-Adjusted Export Strategy* dengan mengedepankan penguatan ekspor komoditas non-tambang unggulan Aceh seperti Kopi, Nilam, dan Minyak Kelapa Sawit (CPO). Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan: (i) Membantu Satuan Tugas (Satgas) Diversifikasi Ekspor, untuk mengkurasi unit usaha, mencari investor, serta penajakan dan pembukaan pasar internasional baru; (ii) Penguatan komoditas ekspor non-tambang dengan optimalisasi fasilitas pendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi ekspor langsung via pelabuhan Aceh untuk ekspor CPO, standarisasi mutu dan kemasan, serta dan peningkatan sarpras unit usaha untuk pengolahan Kopi, Nilam, dan Perikanan.

5. **Peningkatan daya beli masyarakat melalui strategi *Cash-for-Work* untuk proses pemulihan dampak bencana.** Bencana hidrometeorologi berdampak pada kelangsungan hidup dan mata pencarian 2.584.067 orang masyarakat dan sejumlah 670.826 keluarga di 18 Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat melakukan pemulihan/pembersihan daerah yang terdampak bencana dengan menerapkan strategi *cash-for-work* dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat untuk membantu mempercepat proses pemulihan. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal, hal ini juga diprakirakan akan turut memulihkan pendapatan masyarakat setempat yang hilang akibat bencana tersebut.
6. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan dan mendorong peningkatan nilai tambah UMKM.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2026. Penyaluran KUR dan UMI tentunya harus turut diiringi dengan pengembangan kapabilitas UMKM yang terlibat, khususnya pada literasi keuangan dan pembukuan. Dalam hal ini, digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS dan Mesin POS (*Point-of-Sales*) juga akan mempermudah pelaku usaha dalam proses pembukuan dan pencatatan keuangan usaha. UMKM dengan pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik tentunya akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk memperluas skala usahanya.

## Inflasi

Tekanan inflasi diprakirakan akan lebih rendah pada keseluruhan tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, adanya risiko pendorong atau *upside risks* yang dapat mengganggu stabilitas harga dan

pasokan tetap perlu diwaspadai melalui langkah-langkah antisipatif agar inflasi tetap berada pada rentang sasaran nasional. Faktor pendorong harga, baik dari sisi eksternal maupun domestik (terutama pada fase pemulihan pascabencana), harus dimitigasi melalui program-program pengendalian inflasi seperti GPIPS, dengan tetap berpedoman pada strategi 4K. Adapun rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. **Menjamin Ketersediaan Pasokan**, antara lain melalui penguatan koordinasi antarlembaga dalam mempercepat rehabilitasi pascabencana serta akselerasi KAD yang menghubungkan wilayah sentra dan nonsentra. Dari sisi produksi, upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui optimalisasi GAP, replikasi best practice, dan adopsi teknologi pertanian modern (termasuk *urban farming*), yang didukung oleh pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu. Langkah ini turut didorong melalui fasilitasi skema *contract farming* dan hilirisasi pangan guna menjamin kepastian pasar, ketersediaan pasokan, serta stabilitas harga.
2. **Memastikan Keterjangkauan Harga**, yang difokuskan pada upaya mengembalikan harga ke tingkat normal dan stabilisasi pasar melalui operasi pasar murah (antara lain SPHP dan Gerakan Pangan Murah/GPM) di 23 kabupaten/kota, yang dilaksanakan pada waktu dan lokasi yang tepat sasaran. Upaya ini diperkuat dengan pemberian Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) bagi komoditas pangan bergejolak, serta pelaksanaan sidak secara berkala untuk memastikan kestabilan harga di tingkat konsumen. Dari sisi hulu, dilakukan penyaluran bantuan dan peningkatan kapasitas petani, khususnya di wilayah terdampak bencana, serta sinergi dengan BUMN dalam menjamin ketersediaan energi dan cadangan pangan pemerintah.
3. **Optimalisasi Kelancaran Distribusi**, dengan fokus utama pada peningkatan konektivitas antardaerah untuk mendukung distribusi logistik bahan pangan. Selain itu, dapat dilakukan fasilitasi kerja sama antara UMKM pangan dengan *platform e-commerce* untuk memperluas jangkauan pasar. Langkah ini disempurnakan dengan optimalisasi pemanfaatan *cold storage*, khususnya bagi komoditas perikanan dan pertanian, dalam menjaga kualitas produk dan memperpanjang masa simpan di sepanjang rantai pasok.
4. **Penguatan Komunikasi Efektif**, melalui peningkatan akses informasi dan transparansi harga serta pasokan antardaerah, optimalisasi koordinasi TPID, dan pengendalian ekspektasi inflasi. Dalam hal transparansi, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai referensi *early*

*warning system* dalam perumusan kebijakan inflasi. Di sisi lain, penguatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga direalisasikan melalui penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM), serta pelaksanaan *capacity building*. Strategi komunikasi ini turut dilengkapi dengan sinergi aktif bersama media massa guna menjaga ekspektasi masyarakat agar tetap stabil.

5. **Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)**, yang dapat diimplementasikan berdasarkan jangka waktu. Pada jangka pendek, strategi difokuskan pada stabilisasi harga melalui pelaksanaan operasi pasar murah dan sidak pasar, perluasan penyaluran SPHP, serta penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) intra maupun interregional memanfaatkan jalur distribusi BUMN logistik. Langkah ini didukung oleh pelaksanaan *business matching* komoditas pangan, kajian integrasi pasar induk, penerapan *Domestic Market Obligation* (DMO), serta pengembangan *Early Warning System* (EWS) dan Protokol Manajemen Inflasi. Sementara itu, program jangka menengah-panjang diarahkan pada penguatan ketahanan struktural melalui

*piloting* benih hortikultura tahan cuaca, penerapan GAP berbasis agroklimat, serta perluasan *awareness* asuransi pertanian. Upaya ini disempurnakan dengan dukungan sarana pascapanen, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta program pompanisasi dan pembangunan infrastruktur konservasi air di wilayah terdampak bencana.

6. **Mendorong Penguatan Ketahanan Pangan Aceh**, yang secara strategis difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani (Poktan) untuk mendorong produktivitas dan daya tawar petani sebagai produsen utama. Peran BUMDes, Koperasi, serta BUMD turut dioptimalkan sebagai *buffer entity* maupun *ofttaker* dalam menyerap surplus produksi hulu maupun melakukan stabilisasi pasokan saat terjadi kelangkaan. Kualitas data pangan ditingkatkan untuk mendukung efektivitas KAD dan akurasi kebijakan, yang diperkuat dengan pemetaan rantai pasok pangan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Seluruh upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi yang didukung oleh perluasan akses pembiayaan di sektor pangan.



# Daftar Istilah

## **Administered price**

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

## **Andil inflasi**

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/ kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

## **APBA**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **Bobot inflasi**

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

## **Dana Perimbangan**

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

## **Faktor Fundamental**

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

## **Faktor Non Fundamental**

Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

## **Indeks Ekspektasi Konsumen**

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

## **Indeks Harga Konsumen (IHK)**

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

## **Indeks Kondisi Ekonomi**

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

## **Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)**

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

## **Investasi**

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

## **Inflasi inti**

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

## **Liaison**

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan

## **Migas**

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

## **MTM**

*Month to month*. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

## **Omzet**

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

## **PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

## **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

***Perceived risk***

Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara

**QTQ**

*Quarter to quarter.* Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

**Sektor ekonomi dominan**

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

***Volatile food***

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

**YOY**

*Year on year.* Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

## Tim Penyusun

Penanggung Jawab

**Agus Chusaini**

Koordinator Penyusun

**Hendy Hadiyan**

Tim Penulis

**Hafidz Yudhansyah**

**Muhammad Raziq Ilmi**

**Muhammad Kahfi**

**Hafidz Bramandito**

**Hana Nabillah**

**Dwina Olivia Rahmi**

**Kristina Panduwinata**



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI ACEH**

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia  
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116  
<https://www.bi.go.id>

